

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARASI,
PARTISIPASI MASYARAKAT, KOMPETENSI APARAT
DESA, DAN KEBIJAKAN TERHADAP PENGELOLAAN
DANA DESA**

**(Studi Kasus Kantor Desa Di Kecamatan Gatak Kabupaten
Sukoharjo)**

Skripsi



Oleh :

Yulia Dwi Astari

19.21.0017

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2022**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Yulia Dwi Astari
NIM : 19210017
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Pengaruh Akuntabilitas ,Transparansi, Partisipasi
Masyarakat ,Kompetensi Aparat Desa, dan Kebijakan
terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kantor
Desa Di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo)

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi
persyaratan gelar Sarjana Ekonomi.

Pada Hari :
Tanggal :
Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Ismunawan S.E.,M.Si

Anggota : Dr. Rosita S.E.,M.M.,Ak.,CA



Mengetahui,

Ketua STIE Surakarta

Dr. Budi Istiyanto, S.E., M.M., M.H.
NIDN. 0625127401

HALAMAN PENGESAHAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Yulia Dwi Astari

NIM : 19210017

Program Studi : S1 Akuntansi

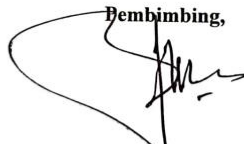
Judul : Pengaruh Akuntabilitas Transparansi Partisipasi Masyarakat Kompetensi dan Kebijakan terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kantor Desa Di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo)

Disetujui dan disahkan:

Hari :

Tanggal :

Pembimbing,



Ismunawan S.E., M.Si
NIDN. 0621027402

Mengetahui,

Kepala Program Studi S1 Akuntansi



Astuning Saharsini S.E.M.Acc
NIDN. 0606129102

Pernyataan Keaslian Skripsi

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

**PENGARUH AKUNTABILITAS TRANSPARASI PARTISIPASI
MASYARAKAT KOMPETENSI APARAT DESA DAN KEBIJAKAN
TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA**

(Studi Kasus Kantor Desa Di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo)

Tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, gelar dan ijazah yang telah diteberikan oleh perguruan tinggi batal saya terima.

Sukoharjo, 9 Desember 2022

Yang memberi Pernyataan

 *Dwi Astari*
Dwi Astari

Motto

Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan soleh, dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan supaya menetapi kesabaran.

(QS. Al-‘Ashr : 2-3).

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan dimuka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.

(QS. Luqman : 18).

Persembahan

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Bapak (Alm) dan Ibu tercinta yang selalu memberi semangat, mengasihiku tanpa pamrih, memberi motivasi, serta sebagai penyemangatku untuk bisa sampai dititik ini.

Kata Pengantar

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi persyaratan kurikulum dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih terdapat hal yang kurang sempurna, sehubungan dengan adanya keterbatasan penulis. Walaupun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin agar inti dari pembahasan dalam skripsi dapat bermanfaat bagi penulis maupun para pembaca.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyelesaian penyusunan skripsi ini, teruma kepada :

1. Bapak Dr. Budi Istiyanto, S.E..M.M, M.H selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
2. Ibu Astuning saharisni S.E. M.Acc selaku ketua program Studi S1 Akuntansi STIE Surakarta.
3. Bapak Ismunawan S,E.,M.Si, selaku Pembimbing yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, serta petunjuk kepada penulis dalam penyusunan skripsi
4. Ibu Era Trianita Saputra.,SE.,M.Si.,MBA selaku Pembimbing Akademik dan untuk Alm. Bapak Dr. Pardi, S.E., M.M., M.H yang sudah menjadi pembimbing akademik dari Semester awal sampai akhir.
5. Segenap Dosen Pengajar dan Karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang sudah membantu dalam penyusunan skripsi
6. Bapak Tri Wahyudi SH,.MM , selaku Camat di Wilayah Kecamatan Gatak yang telah memberikan izin dalam penelitian ini.
7. Bapak dan Ibu perangkat desa di Wilayah Kecamatan Gatak yang sudah membantu atas kelancaran skripsi ini.
8. Bapak (Alm) dan ibu tercinta yang senantiasa memberikan semangat dan doa yang tak pernah putus untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini.

9. Kakak-kakakku (Rika, Eka, Dwi, Sulis), serta ponakan (Yumna, dama)
terimakasih atas dorongan dan kasih sayang kalian selama ini.
10. Fanny Alviyatama yang selalu memberi semangat serta dorongan untuk
menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabatku (Manzila, Aulia, dan Annisa) yang selalu ada untuk menjadi
keluh kesah dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman seperjuangan (Erika, Aji, Iyan, dan seluruh teman satu angkatan).

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa inilah hasil terbaik yang dapat penulis ciptakan sampai saat ini. Walaupun masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Sukoharjo, 10 Desember 2022

Penulis

Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan Skripsi.....	ii
Pengesahan Skripsi.....	iii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iv
Motto dan Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran.....	xii
Abstrak.....	xiii

BAB I Pendahuluan

1. Latar Belakang.....	1
2. Perumusan Masalah.....	4
3. Tujuan Penelitian.....	5
4. Manfaat Penelitian.....	6

BAB II Tinjauan Pustaka

1. Teori Yang Relevan.....	7
a. Pengertian Desa.....	8
b. Pengelolaan Dana desa.....	10
c. Pengertian Dana Desa.....	15
d. Sumber Dana Desa.....	16
e. Manfaat Dana Desa.....	17
f. Alokasi Dana Desa.....	18
g. Akuntabilitas.....	19
h. Transparansi.....	22
i. Partisipasi Masyarakat.....	23
j. Kompetensi Aparat Desa.....	26

k. Kebijakan.....	28
2. Penelitian Terdahulu.....	30
3. Kerangka Pikir.....	33
4. Hipotesis.....	34
BAB III Metode Penelitian	
1. Objek Penelitian.....	40
2. Jenis Penelitian dan Sumber Data.....	40
3. Populasi dan Sampel.....	42
4. Teknik Pengumpulan Data.....	43
5. Definisi Operasional.....	44
6. Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV Analisis dan Pembahasan	
a) Deskripsi Objek Penelitian.....	53
b) Identitas Responden.....	54
c) Analisis Data.....	62
d) Pembahasan dan Hasil Penelitian.....	77
BAB V Penutup	
1. Kesimpulan.....	86
2. Saran.....	87

Daftar Tabel

1. Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	30
2. Tabel 2 Jumlah Responden.....	43
3. Tabel 3. Skala Likert.....	44
4. Tabel 4. Definisi Operasional.....	45
5. Tabel 5. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	62
6. Tabel 6. Responden Berdasarkan Umur.....	63
7. Tabel 7. Responden Berdasarkan Lokasi Kerja.....	63
8. Tabel 8. Uji Validitas.....	64
9. Tabel 9. Uji Reliabilitas.....	66
10. Tabel 10. One-Sample Kolmogorov-smirnov.....	67
11. Tabel 11. Uji Multikolenieritas.....	68
12. Tabel 12. Uji Autokorelasi.....	69
13. Tabel 13. Uji Heteroskedastisitas.....	69
14. Tabel 14. Hasil Agresi Linier Berganda.....	71
15. Tabel 15. Uji F.....	73
16. Tabel 16. Uji T.....	74
17. Tabel 17. Uji R.....	77

Daftar Gambar

1. Gambar 1. Kerangka Pikiran.....	33
2. Gambar 2. Peta Gatak.....	53
3. Gambar 3. Kelurahan Saggung.....	54
4. Gambar 4. Kelurahan Kagokan.....	55
5. Gambar 5. Kelurahan Blimbing.....	55
6. Gambar 6. Kelurahan Krajan.....	56
7. Gambar 7. Kelurahan Geneng.....	56
8. Gambar 8. Kelurahan Jati.....	57
9. Gambar 9. Kelurahan Trosemi.....	57
10. Gambar 10. Kelurahan Luwang.....	58
11. Gambar 11. Kelurahan Klaseman.....	58
12. Gambar 12. Kelurahan Sragen.....	59
13. Gambar 13. Kelurahan Wironanggan.....	59
14. Gambar 14. Kelurahan Trangsan.....	80
15. Gambar 15. Kelurahan Tempel.....	81
16. Gambar 16. Kelurahan Mayang.....	81

Daftar Lampiran

1. Lampiran 1. Kuisisioner Penelitian.....
2. Lampiran 2. Identifikasi Responden.....
3. Lampiran 3. Kuisisioner.....
4. Lampiran 4. Hasil Olah Data.....
5. Lampiran 5. Surat Izin Penelitian.....
6. Lampiran 6. Hasil Kuisisioner.....

**PENGARUH AKUNTABILITAS TRANSPARANSI PARTISIPASI
MASYARAKAT KOMPETENSI APARAT DESA DAN KEBIJAKAN
TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Kasus Kantor Desa Di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo)**

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparat Desa, dan Kebijakan Terhadap pengelolaan dana desa di wilayah Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo. Populasi dan Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 112 Responden dengan menggunakan metode Sampel Jenuh. Data yang digunakan adalah Data Primer yang diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat sekitar tentang Pengelolaan Dana Desa di wilayah Kecamatan Gatak dan mengajukan pernyataan yang sudah dipersiapkan dengan menyebarkan Kuisioner dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan alat analisis SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas transparansi, partisipasi kompetensi dan kebijakan berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel pengelolaan dana desa.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Kompetensi, dan Kebijakan.

BAB I

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Desa seringkali identik dengan keterbelakangan pendidikan, pertumbuhan ekonomi yang rendah, dan kolot tradisional (Furqaini Astri, 2009). Atas dasar itu, untuk mencapai tujuan nasional Karya pembangunan sila ke-5 Pancasila sangat penting Memperkuat desa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk Mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan komitmen Dengan undang-undang tahun 1945, bangsa Indonesia meluncurkan paradigma tersebut pembangunan desa sebagai bagian dari penduduk Indonesia adalah desa. . Namun, hingga saat ini, pembangunan hanya terfokus pada pertumbuhan perkotaan sehingga menimbulkan ketimpangan. Keterbelakangan dan kemiskinan selalu terjebak di desa. Dapat dikatakan bahwa desa adalah wilayah terkecil dari aturan yang disepakati bersama untuk menciptakan ketertiban, Kesejahteraan dan kebahagiaan, yang dianggap hak dan tanggung jawab kelompok masyarakat. Diharapkan perencanaan desa dapat mendukung pembangunan negara, harus didukung dengan efisiensi mesin sesuai peraturan daerah . UU No 6 Tentang Desa Tahun 2014 tentang Desa bagian ke VIII mengenai keuangan desa dan aset desa, memaparkan mengenai keuangan desa dan pendapatan asli desa. Keuangan desa dikelola oleh Kepala Desa. Kepala Desa dapat memberikan kuasa kepada aparatur desa yang memiliki keahlian yang memadai.

Rata-rata para senior SMA dan pejabat desa yang sudah lanjut usia menjadi sorotan sehingga terjadi kesalahan administrasi yang berujung pada salah alokasi dana. Hal ini merupakan kekhawatiran masyarakat akan adanya penipuan atau penyalahgunaan dana desa. . Kompetensi yang dimiliki oleh aparat pengelola dana desa menjadi syarat utama agar akuntabilitas dana desa bisa berjalan dengan maksimal dalam melaksanakan pengelolaan dana desa sebagai akibat desentralisasi fiskal yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kepada pemerintah desa dibutuhkan kesiapan, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah sumber daya manusia (Ferina,2016).

Banyaknya kasus penyimpangan penggunaan dana desa menuntut pemerintah untuk melakukan pembenahan, baik dengan pembenahan aparat desa maupun dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen publik yang baik (Putra & Rasmini, 2019). Hal ini sesuai dengan Permendagri No. 113 (2014) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus didasarkan pada asas-asas transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilaksanakan dengan tertib disiplin anggaran. Apalagi diperlukan aparat desa yang handal dan berkompeten, baik secara teknis maupun administratif dalam pengelolaan dana desa (Masruhin & Kaukab, 2019). Serta, dengan berpedoman kebijakan hukum karena setiap pemerintah desa secara hukum memiliki hak atau wewenang meskipun berskala kecil yang mencakup wilayah administrasi desa itu sendiri (Dura, 2016).

Temuan kasus dan penyidikan Inspektorat Sukoharjo menunjukkan lemahnya sistem kontrol di Inspektorat Sukoharjo sehingga menyisakan kebebasan dan celah bagi kepala desa yang kurang ajar untuk memanipulasi anggaran dana desa. Ditemukan empat desa yang diduga kuat melakukan

penyalahgunaan dana desa. Dengan adanya dugaan penyimpangan dana desa ini, Djoko Purnomo mengimbau kepada seluruh kepala desa dan perangkat desa untuk memahami ketentuan yang berlaku terkait pengelolaan dana desa. Kemudian, dalam pengelolaannya agar menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (Dikutip dari Solocom.com).

Melihat fenomena di atas terkait pengelolaan dana desa yang tidak efektif, maka perangkat desa harus bertindak lebih bertanggung jawab, transparan, dari segala sisi, kompeten dan sesuai arahan.. Hal ini dikarenakan jika potensi pengelolaan keuangan desa dilakukan secara efisiensi maka kecukupan ekonomi dalam kehidupan masyarakat akan menjadi filosofi yang tepat untuk berperilaku sesuai dengan tingkatan kehidupan masyarakat dan hal ini berlaku untuk strategi pembangunan yang seimbang bagi Negara Indonesia (Chomariyah, 2016).

Pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan pemerintah daerah. Setelah mengetahui kasus dan masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Sanggung dengan judul **Pengaruh Akuntabilitas Transparansi Partisipasi Masyarakat Kompetensi dan Kebijakan terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kantor Desa Di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo)** untuk mewujudkan *good governance* pada desa demi kemajuan perekonomian desa yang lebih baik dan akurat.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah ini adalah:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh desa terhadap pengelolaan dana desa ?
2. Apakah transparasi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa ?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa?
4. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa?
5. Apakah kebijakan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa?
6. Apakah akuntabilitasi, transparasi, partisipasi masyarakat, kompetensi, dan kebijakan erpengaruh terhadap pengelolaan dana desa?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendiskripsikan pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap pengelolaan dana desa
2. Mendiskripsikan pengaruh transparasi pengelolaan dana desa terhadap pengelolaan dana desa
3. Mendiskripsikan pengaruh partisipasi masyarakat pengelolaan dana desa terhadap pengelolaan dana desa
4. Mendiskripsikan pengaruh kompetensi pengelolaan dana desa terhadap pengelolaan dana desa
5. Mendiskripsikan pengaruh kebijakan pengelolaan dana desa terhadap pengelolaan dana desa
6. Mendiskripsikan pengaruh akuntabilitasi, transparasi, partisipasi masyarakat, kompetensi, dan kebijakan pengelolaan dana desa terhadap pengelolaan dana desa.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang akan dilakukan adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil kajian dapat memperkaya diskusi ilmiah dan memajukan kerja pemerintahan desa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antar perangkat desa, meningkatkan motivasi perangkat desa, **dan** meningkatkan kinerja perangkat desa.

3. Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengawasan kepada pemerintah desa untuk memperbaiki dan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, kompetensi perangkat desa dan kebijakan yayasan desa kedepannya.

4. Peneliti

Mereka memahami akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, keterampilan perangkat desa dan kebijakan dana desa serta mampu mengembangkan teori-teori yang telah dijelaskan.

5. STIE Surakarta

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah referensi dan pengetahuan bagi mahasiswa STIE Surakarta.

BAB II

Tinjauan Pustaka

1. Teori Yang Relevan

Teori Panatalayan (Stewardship Theory)

Teori manajemen adalah teori yang menjelaskan keadaan dimana manajer termotivasi hanya oleh tujuan utama organisasi. Jadi, teori ini didasarkan pada psikologi dan sosiologi dan dirancang untuk memotivasi para manajer agar bertindak sesuai dengan keinginan pelanggan. Selain itu, pramugari setia pada organisasinya karena mereka bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi daripada keuntungan pribadi (Donaldson & Davis, 1991).

Teori ini didasarkan pada konsep bahwa manajemen organisasi memiliki tanggung jawab kepada pemilik untuk melindungi aset yang dipercayakan kepadanya. Pemilik bertindak sebagai prinsipal dan manajemen (direktur) sebagai administrator (Pasoloran, 2001). Menurut Asmawati & Basuki (2019) teori Stewardship dalam konsep pengelolaan dana desa, yakni pemerintah sebagai eksekutif (steward) dan rakyat sebagai prinsipal. Dimana pengurus desa memiliki tugas mengelola dan bertanggung jawab atas perekonomian desa pemimpin masing-masing program. Perangkat desa dianggap sebagai administrator sebagai pelayanan untuk kepentingan umum, yaitu Perangkat desa harus dimotivasi untuk bertindak secara kolektif, yaitu. mengutamakan pencapaian tujuan bersama di atas tujuan pribadi. Dengan demikian, tujuan penyaluran dana desa tercapai

dan itu juga menguntungkan masyarakat karena menjadi kenyataan Pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, akan menjalin kemitraan yang kuat antara pemerintah dengan masyarakat

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN mengatur bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan tentang keuangan negara, antara lain Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi. PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Pasal 96 ayat 1 dan 2 PP 47 Tahun 2015 perubahan atas PP 43 Tahun 2014 tentang Besaran Alokasi dana Desa. PERPRES No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PP No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. UU No 1 Tahun 2012 mengatur mengenai lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah negara. Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa. Dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus

Disease 2019. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Selain dengan teori perundang-undangan, teori dari penelitian terdahulu (Aulia, Maryono, 2022) menyatakan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kompetensi aparat desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Sedangkan secara parsial transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat dan kompetensi aparat desa berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

a. Pengertian Desa

Secara etimologis, kata desa berasal dari bahasa Sansekerta deca yang berarti tanah atau tempat lahir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah keluarga sedarah yang diberi wewenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri dan dipimpin oleh kepala desa. sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 1 dijelaskan bahwa desa adalah satuan terkecil dalam susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berhak dan berwenang mengatur, mengurus dan mengurus sendiri rumah tangga berdasarkan hak asal usul, hak tradisional, dan inisiatif yang diambil dengan menghormati aturan dan norma yang diterapkan dan ditetapkan oleh organisasi yang berwenang. Berikut beberapa pengertian desa menurut para ahli :

1. Menurut (R. Bintarto, 2011:4), Desa adalah perwujudan kesatuan geografis, sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang mengatur suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya dengan daerah lain.
2. Menurut (Paul H. Landis, 2014:15), desa adalah kawasan yang ditandai dengan intensitas hubungan sosial yang tinggi dan berpenduduk kurang dari 2.500 jiwa.
3. Menurut (Sutardjo Kartohadikusumo, 2015:9), Desa adalah badan hukum yang dihuni oleh sekelompok orang yang mengatur dirinya sendiri. Dari pendapat para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa desa pada hakekatnya adalah tempat sekelompok orang hidup dan tinggal bersama di dua negara, diatur oleh aturan dan standar yang meningkatkan kerja sosial, mencapai tujuan yang sama. taraf hidup dan kualitas hidup sesuai dengan kemampuan masing-masing orang.

b. Pengelolaan Dana Desa

Mengatur dana desa adalah serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, implementasi dan evaluasi serta tanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan maka dalam mengatur dana desa harus berdasarkan prinsip terbuka, tanggung jawab dan partisipasi serta dikerjakan secara teratur dan patuh untuk mendorong terciptanya good governance dalam pelaksanaan pemerintahan di masyarakat desa (Permendagri No.113 Tahun 2014). Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui jika pengelolaan dana desa adalah kegiatan yang meliputi proses penyelenggaraan anggaran yang berasal dari APBN yang akan disalurkan ke setiap desa yang selanjutnya akan diawasi dan dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Pengelolaan atau pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pelaporan,

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa (Bastian, 2015: 24). Manajemen adalah serangkaian tugas yang Anda lakukan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek yang harus menjadi perhatian khusus bagi mereka yang tertarik dengan kota. Aparatur desa adalah pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan barang milik desa. Aspek ini harus diperhatikan untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi keuangan desa. Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, Keuangan Desa merupakan kegiatan menyeluruh yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban desa. Prinsip pengelolaan keuangan desa meliputi keterbukaan, partisipatif, akuntabilitas, keteraturan dan disiplin dalam penggunaan anggaran. Salah satu hal terpenting dalam pengelolaan dana desa adalah partisipasi masyarakat. Dengan berpartisipasi, Dewan harus menyelenggarakan kegiatan dengan menggunakan model. Swakelola, pelaksanaan dan perencanaan yang sesuai Masyarakat beroperasi secara mandiri dengan bantuan bahan mentah dan tenaga kerja lokal, sehingga alokasi modal untuk pembangunan desa tidak ke mana-mana. Dalam pengelolaan keuangan desa, hal ini memerlukan mekanisme kontrol untuk tujuan kontrol. Perekonomian desa menjadi lebih bertanggung jawab. Untuk meningkatkan efektivitas mekanisme pengawasan dan meminimalisir pelanggaran yang timbul, akan diberikan sanksi bagi yang melaksanakan tugas yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengelolaan dana desa dipegang oleh kepala desa. Namun dalam proses pelaksanaannya, kepala desa didukung oleh kepala desa, sehingga pelaksanaan pengelolaan dana desa dilakukan oleh kepala desa dan pejabat teknis pengelolaan keuangan (PTPKD) desa Menurut Perbup Kabupaten

Ponorogo No.16 tahun 2015 tentang pengelolaan dana desa pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan dana desa :

1. Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan dana desa.
2. Sekretaris Desa selaku koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
3. Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan sesuai bidangnya.
4. Bendahara Selaku perangkat desa pada urusan keuangan.

Penggunaan dan pengelolaan dana desa sendiri bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa agar aparatur pemerintahan di desa lebih tertib dan teratur. Berikut contoh penggunaan dan pengelolaan dana desa yang tepat

1. Pendidikan

Karena kedua faktor tersebut, pendidikan di desa masih lemah Tradisi, adat istiadat dan peternakan desa. Serupa yang diketahui bersama, pendidikan di desa tidak sebaik dan siap di desa. yaitu penggunaan dan pengelolaan dana. Desa ini diperuntukkan untuk dana pendidikan. Padahal dengan mengenyam pendidikan lebih baik ini, mereka mampu menerima kehidupan lebih baik di masa yang akan datang.

Setiap tahun, banyak anak di desa tersebut yang tidak bersekolah dan putus sekolah. Mereka suka membantu orang tua mereka untuk ekonomi yang lebih baik. Anak-anak harus memiliki hak atas pendidikan yang lebih baik selama yang mereka miliki sebelumnya. Sanitasi dan Air Minum.

Meskipun terdapat sumber air minum di desa yang dapat diperoleh dengan cara sederhana, namun sumber air minum tersebut tetap perlu

dikelola dengan baik. Sayangnya, masyarakat desa kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang sanitasi dan penyediaan air minum, sehingga perawatan ini sendiri terkesan tidak terkelola dengan baik dan masih terkendala dana. Akibatnya, sejak tahun 2007, WHO menetapkan bahwa fasilitas MCK dan air minum yang tidak dirawat dengan baik mempengaruhi kesehatan penduduk melalui penyakit diare.

2. Kesehatan

Selain itu, pemanfaatan dana desa dan pengobatan di bidang kesehatan. Diketahui bahwa pelayanan kesehatan di desa sangat sedikit dan sporadis, sehingga pemerintah desa harus memberikan perhatian dan pengawasan yang ketat. Di desa sendiri, biasanya hanya ada Puskesmas dan Posyandu paling banyak di dua tempat. Ada juga masyarakat yang hanya memiliki satu puskesmas atau posyandu dengan jumlah tenaga medis yang terbatas. Hal ini dilakukan mengingat masyarakat desa masih mempercayai pengobatan tradisional dan belum sepenuhnya mempercayai obat tersebut. Pemerintah mulai memprioritaskan hal menggunakan melakukan pengenalan lewat pemerintah desa serta organisasi kemasyarakatan yang terdapat di desa itu sendiri. Jika sudah terdapat puskesmas atau posyandu, langkah pemerintah artinya menggunakan menambah dan memperbaiki fasilitas kesehatan dan pemberian intensif yg memadai buat para energi medis yg bertugas. dalam hal kesehatan di desa ini, pemerintah pun sangat memperhatikan para perempuan terutama ibu hamil serta menyusui. sebab angka kematian mak hamil ini masih tinggi serta pengasuhan anak yang belum tepat.

3. Infrastruktur

Penggunaan dan pengelolaan dana desa selanjutnya adalah untuk infrastruktur desa. Tujuan infrastruktur adalah untuk menciptakan ruang publik di kota, misalnya. tempat pertemuan, tempat ibadah, pos keamanan, perbaikan jalan, perbaikan bangunan yang rusak, pembangunan jembatan, dll. Pembangunan infrastruktur di desa sendiri tidaklah mudah, mereka masih melakukannya dengan cara tradisional, sehingga tidak bisa sembarangan membangunnya. Tentunya untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah desa selalu melibatkan para pelaku adat atau tetua adat untuk membicarakan pembangunan infrastruktur yang diperlukan yang belum terbangun di desa tersebut. . Oleh karena itu, masuk akal jika pembangunan di desa tidak sepenting di perkotaan. namun, secara keseluruhan prioritas pembangunan pemerintah adalah memperbaiki jalan agar lebih mudah bagi penduduk lokal dan asing untuk mengunjungi desa tersebut.

4. BUMDes

Penggunaan dan pengelolaan dana desa untuk mengembangkan BUMDes sangat penting karena dapat membantu menghidupkan perekonomian desa. Diketahui dengan adanya BUMDes, banyak masyarakat yang terdorong untuk berwirausaha dengan menghasilkan produk dari desa itu sendiri. Dengan cara ini, mata pencaharian di desa lebih terputus dan beragam. Dana desa dibelanjakan untuk BUMDes sendiri yang dapat membantu warga desa bekerja lebih efisien. Mereka akan didukung dengan permodalan, manajemen produksi, distribusi dan pemasaran. contoh praktis pengelolaan dana desa untuk BUMDes adalah

terciptanya desa wisata. Mendirikan desa wisata ini membutuhkan modal yang tidak sedikit. Tentunya dengan adanya BUMDes, harapan masyarakat untuk menjadi desa wisata dapat terwujud.

c. Pengertian Dana Desa

Menurut Buku Panduan Dana Desa yang dirilis oleh Menteri Keuangan, tahun 2017 mendefinisikan Dana Desa sebagai anggaran dari APBN yang disisihkan kepada desa untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana tersebut. APBD Kota/Kabupaten. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dicadangkan untuk desa dan ditransfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dan instansi tingkat kota serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan menurut Lili (2018), dana desa adalah dana yang diterima desa setiap tahunnya dari APBN yang sengaja diberikan kepada desa dengan cara ditransfer langsung melalui APBD kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai seluruh desa. proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa dan pemberdayaan seluruh masyarakat desa. Berdasarkan acuan di atas, dana desa merupakan anggaran milik desa dan pemerintah pusat wajib memberikannya kepada desa dengan cara langsung ditransfer dari APBN ke APBD kemudian diimpor ke kas desa.

d. Sumber Dana Desa

Dalam perannya sendiri, desa memiliki kekuatan untuk secara mandiri mengarahkan pemerintahan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan. Kantor Pusat dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Penatausahaan Keuangan Desabahwa sumber pendapatan desa terdiri atas 3 sumber, yaitu :

1. Pendapatan Asli Desa (PADes) Pendapatan ini terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha : Hasil Bumdes, tanah kas desa.
 - b. Hasil asset : Pasar desa, tempat pemandian umum, irigasi.
 - c. Swadaya , partisipasi, dan gotong royong : peran masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
2. Pendapatan lain-lain asli desa : hasil pungutan desa.
 - a. Transfer meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - b. Pendapatan lain-lain meliputi hibah dan pendapatan desa yang sah.

e. Tujuan dan Manfaat Dana Desa

Tujuan dana desa menurut (dosenppkn.com diakses tanggal 25 Januari 2020) adalah:

1. Menciptakan ketentraman penduduk desa
2. Meningkatkan pelayanan dan prasarana umum di desa

Sedangkan UU No 6 Tahun 2014 menetapkan bahwa tujuan dana desa adalah untuk melayani desa, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan perekonomian desa, menutup kesenjangan pembangunan antar desa dan memberdayakan masyarakat desa sebagai tujuan perubahan. Alokasi anggaran desa oleh pemegang hak membantu mempercepat rencana

pembangunan infrastruktur untuk memenuhi perkembangan masyarakat yang pesat. Adapun manfaat dari adanya anggaran desa adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan aspek ekonomi dan pembangunan. Adanya dana APBD membantu mempercepat pendistribusian atau akses ke desa dan mengatasi permasalahan yang lambat terselesaikan akibat alokasi anggaran khususnya dalam pembangunan infrastruktur publik. dilakukan secara adil dan wajar.
- b) Memantapkan sumber daya manusia yang ada di desa. Anggaran dana desa yang dialokasikan oleh Negara setiap tahunnya semakin meningkat, yang menuntut kualitas sumber daya manusia desa dalam pengelolaan dana tersebut. Oleh karena itu, dana tersebut tidak hanya digunakan untuk pembangunan desa seperti infrastruktur dan peralatan, tetapi juga untuk pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. (dosenppkn.com diakses 25 Januari 2020). Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dan manfaat dana desa pada dasarnya tidak lain adalah untuk mensejahterakan masyarakat desa, baik dari segi pembangunan maupun ekonomi.

f. Alokasi Dana Desa (ADD)

Manajemen keuangan adalah proses pengelolaan persediaan dan penggunaan uang dalam segala upaya kerja sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan (manajemen adalah proses yang meliputi fungsi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pertanggungjawaban (Ultafiah, 2017) pengelolaan keuangan dana desa merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Proyek APBD, oleh karena itu pengelolaan keuangan desa harus mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan alokasi dan belanja dana desa Dana anggaran yang

dialokasikan ke desa disalurkan melalui Badan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota/ Pendapatan dan Pengeluaran dan digunakan untuk membiayai pengelolaan negara, pekerjaan, pembangunan, dll menjadi . pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

g. Akuntabilitas

Pengelolaan keuangan adalah suatu proses pertanggungjawaban, secara harfiah dalam bahasa Inggris dikenal dengan akuntabilitas, diartikan sebagai mengambil tanggung jawab (Mardiasmo, 2002). Sedangkan menurut Fajri (2015), akuntabilitas adalah kewajiban untuk mengalihkan tanggung jawab atau menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau arah kolektif suatu organisasi kepada pihak yang berhak atau berwenang untuk meminta informasi atau untuk dimintai pertanggungjawaban. . Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 menyebutkan bahwa tanggung jawab yang dimaksud antara lain adalah tanggung jawab pengelolaan keuangan desa yang telah ditugaskan kepada desa. meliputi :

1. Perencanaan, perencanaan perlu dilakukan agar penggunaannya dapat berjalan sesuai sasaran, efektif, dan efisien
2. Pelaksanaan, pelaksanaan memiliki prinsip umum yang harus ditaati mencakup penerimaan dan pengelolaan keuangan.
3. Penatausahaan, kegiatan mencatat yang dilakukan Bendahara Desa atas transaksi penerimaan dan pengeluaran.
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban, yaitu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan desa.

Selain pengertian diatas, para ahli lain juga berpendapat bahwa,

1. Sabeni dan Ghozali dalam Sujarweni (2015) Tanggung jawab atau tanggung jawab pemerintah adalah suatu jenis kewajiban seseorang (direktur/pemimpin/manajer) untuk memastikan bahwa tugas dan kewajiban dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas berarti mempertanggung jawabkan kegiatan pemerintah desa, mulai dari perencanaan hingga pengawasan pelaksanaan anggaran, serta melaporkan secara baik kepada masyarakat dan pemerintah yang lebih tinggi sesuai peraturan perundang-undangan setiap kali kegiatan dilaksanakan.
2. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mahmudi dan Ultafiah, 2017). Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kontribusi dan peran penatausahaan keuangan desa dalam pelaksanaannya melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan.
3. Menurut Sujarweni (2015), akuntabilitas di atas merupakan asas yang menjamin segala tindakan pemerintah desa dapat dijelaskan secara terbuka kepada seluruh lapisan masyarakat. Mahmudi (2015) memaparkan aspek akuntabilitas yang harus dihormati oleh lembaga publik. termasuk:

a) Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas hukum

Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas hukum adalah kewajiban lembaga publik untuk bertindak jujur dalam pekerjaannya dan mematuhi hukum yang berlaku.

b) Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial adalah tanggung jawab lembaga publik untuk mengelola organisasi secara efektif dan efisien .

c) Akuntabilitas program

Tanggung jawab program dalam arti tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah, terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah DPR/DPRD dan masyarakat luas..

d) Akuntabilitas finansial

Akuntabilitas program dalam arti pemerintah baik pusat maupun daerah mempertanggungjawabkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah DPR/DPRD dan masyarakat luas. .

h. Transparansi

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menyatakan bahwa transparansi adalah penyediaan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, berdasarkan keyakinan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka dan penuh tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan. untuk itu. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan.

1. Sujarweni (2015) menyatakan bahwa keterbukaan menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk menerima informasi tentang pengelolaan, terutama informasi tentang kebijakan, proses perancangan dan pelaksanaan serta hasil yang dicapai. Tata kelola yang baik memerlukan transparansi, partisipasi dan kemudahan akses bagi warga negara terhadap proses pemerintahan. Transparansi dan kemudahan pengelolaan data memengaruhi kinerja beberapa metrik lainnya
2. Menurut Hamid (2016), transparansi adalah asas keterbukaan yang memungkinkan masyarakat menerima informasi sebanyak-banyaknya mengenai pendanaan daerah. Transparansi didasarkan pada akses bebas

terhadap informasi. Informasi yang berguna bagi publik mudah diakses oleh mereka yang memerlukannya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keterbukaan adalah keterbukaan kepala desa kepada kepala kota untuk menerima informasi tentang pengelolaan keuangan koperasi desa sehingga mereka memerintah desa. dewan perwakilan provinsi. Transparansi suatu negara dapat muncul ketika sistem pemerintahan suatu negara memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan masyarakat luas.

i. Partisipasi Masyarakat

1. Pengertian Partisipasi

Menurut Andriani (2018) Partisipasi dapat dipahami sebagai partisipasi sadar seseorang dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pemahaman ini, seseorang dapat berpartisipasi ketika berada di dalam atau di dalam kelompok melalui proses berbagi nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan, dan tanggung jawab bersama yang berbeda.

Sedang di dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakat di luar pekerjaan atau profesinya sendiri (Theresia *et all* 2015 : 196)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi berarti ikut serta dalam mengikuti dan mengiringi kegiatan. Selain itu, partisipasi juga merupakan keikutsertaan bersama dalam kegiatan bersama di luar pekerjaan atau profesi sendiri.

2. Pengertian Masyarakat

Menurut Purwaningsih (2020 : 41) menyatakan bahwa Masyarakat merupakan sekelompok orang yang hidup bersama dengan semua budaya dan kepribadian. Agar masyarakat dapat hidup rukun, maka harus ada seperangkat aturan dan norma yang menjadi kesepakatan seluruh anggota masyarakat dan menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat

Menurut Handayani (2017) menyatakan bahwa Masyarakat merupakan Sekelompok makhluk dengan realitas baru, berkembang menurut hukumnya sendiri dan berkembang menurut perkembangannya sendiri. .

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah kesatuan masyarakat yang hidup bersama dalam lingkungan yang produktif secara budaya dan tunduk pada aturan-aturan tertentu yang merupakan aturan.

3. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Pengertian Partisipasi Masyarakat Theresia *et all* (2015;196) Partisipasi didefinisikan keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang memotivasi mereka untuk berpartisipasi dan bertanggung jawab atas pencapaian tujuan kelompok.

Pengertian Partisipasi Masyarakat menurut, Theresia *et all* (2015;196) mengatakan pengertian dasar partisipasi adalah Keterlibatan dalam kegiatan, sedangkan konsep keterlibatan masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, dimana masyarakat dilibatkan mulai dari tahap persiapan dan penyusunan program, melalui perencanaan dan pengembangan, hingga perumusan strategi dan pengambilan keputusan.

Setiap komunitas diberdayakan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungannya. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menyangkut perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dan menjadi tanggung jawab masyarakat untuk ikut serta dalam penguasaan dana yang disediakan oleh masyarakat. (Tasya 2019)

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan yang didorong oleh kesadaran tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam hal tersebut. Kesadaran serta keterlibatan yang dimaksud pada penelitian ini adalah sikap masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sikap masyarakat dalam hal ini, yakni memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan dalam jumlah yang telah ditentukan.

j. Kompetensi Aparat Desa

1. Pengertian Kompetensi

Kompetensi pada dasarnya berarti kemahiran, kecakapan, kemampuan. Sumber daya manusia harus kompeten, yang berarti bahwa sumber daya manusia tersebut berkualitas, mampu atau kompeten. Istilah kompetensi mengacu pada karakteristik atau kualitas seseorang yang membuat mereka sukses di tempat kerja (Widyatama, 2017).

Dari teori yang dikemukakan, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai digunakan untuk

melaksanakan suatu pekerjaan. Pegawai yang tidak memiliki karakteristik seperti pengetahuan yang cukup akan bekerja lebih lama dan mengakibatkan banyak waktu dan tenaga yang terbuang (Atiningsih, 2019). Pengetahuan mesin desa diperlukan agar pengelolaan sumber daya desa berkembang secara berbeda. Oleh karena itu, dalam praktiknya, mesin desa harus memiliki kecerdasan, pengetahuan, dan keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hal ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan desa (Widiawaty, 2019).

a. Pengertian Aparat Desa

Perangkat desa merupakan unsur aktor desa yang berperan penting dalam pembangunan pembangunan desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintahan desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yaitu perangkat desa yang berada di bawah kepala desa (Indrianasari, 2017).

Kompetensi aparat desa sangat diperlukan agar pengelolaan dana desa dapat berkembang dalam berbagai aspek. Untuk itu dalam pelaksanaannya, aparatur desa harus mempunyai kecerdasan pengetahuan dan ketrampilan yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab aparatur desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa (Widiawaty, 2019).

Aparatur desa yang kurang memiliki pengetahuan dan ketrampilan di bidangnya menghadapi kesulitan dan keterlambatan dalam pekerjaannya. Keterlambatan pekerjaan dapat mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan uang. Pembangunan mesin desa diperlukan untuk mengikuti perkembangan masyarakat, perkembangan teknologi dan

semakin banyaknya tugas dan wewenang yang harus dipenuhi. (Husna, 2016).

Edson, dkk (2017) menyatakan untuk memenuhi unsur kompetensi seorang pegawai harus memenuhi indikator dibawah ini

1. Pengetahuan (Knowledge), memiliki pengetahuan yang diperoleh dari belajar secara formal atau dari pelatihan-pelatihan terkait bidang pekerjaan yang ditanganinya.
2. Keahlian (Skill), memiliki keahlian terhadap bidang pekerjaan yang ditanganinya dan mampu menanganinya secara detail untuk memecahkan masalah dengan cepat dan efisien
3. Sikap (Attitude), menjunjung tinggi etika organisasi dan memiliki sikap positif (ramah dan sopan) dalam bertindak

Dari teori tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pengetahuan tentang mesin desa merupakan salah satu faktor utama dalam pembangunan dan kemajuan desa. Oleh karena itu, mesin desa harus memiliki kecerdasan di bidang pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan atau kepintaran aparat desa di bidangnya dapat memberikan sajian yang diinginkan.

k. Kebijakan

Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memperjelas tugas, peran, dan fungsi desa dalam mengelola desa, menjalankan pemerintahan desa, dan memberikan pelayanan bagi masyarakat guna tercapainya cita-cita bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penetapan UU Nomor 6 Tahun 2014 mempertegas bahwa pemerintah desa dalam mengatur desa tidak akan terlepas dari tujuan pengaturan desa dan menjadikannya dasar dalam melaksanakan pembangunan desa (Chasanah et

al., 2017). Kebijakan adalah Ketentuan dan pedoman yang ditetapkan dan ditetapkan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, politik desa merupakan salah satu produk hukum karena setiap pemerintah desa secara hukum memiliki hak atau kewenangan meskipun dalam tingkatan yang kecil meliputi suatu wilayah. Pemerintahan desa itu sendiri (Dura, 2016). Peraturan desa termasuk dalam peraturan desa yang berlaku di wilayah desa. Peraturan desa tidak dimaksudkan untuk melaksanakan otonomi yang mandiri tetapi bertanggung jawab atas otonomi ketika desa tetap berada di bawah kendali pemerintah kabupaten/kota. Namun desa memiliki kekuatan untuk membantu menentukan arah pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan desa pada khususnya. (Novitasari, 2019).

2. Penelitian Terdahulu

Mahasiswa diwajibkan cari dan baca artikel dari penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan

Variabel Y (Variabel Dependen-nya) :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

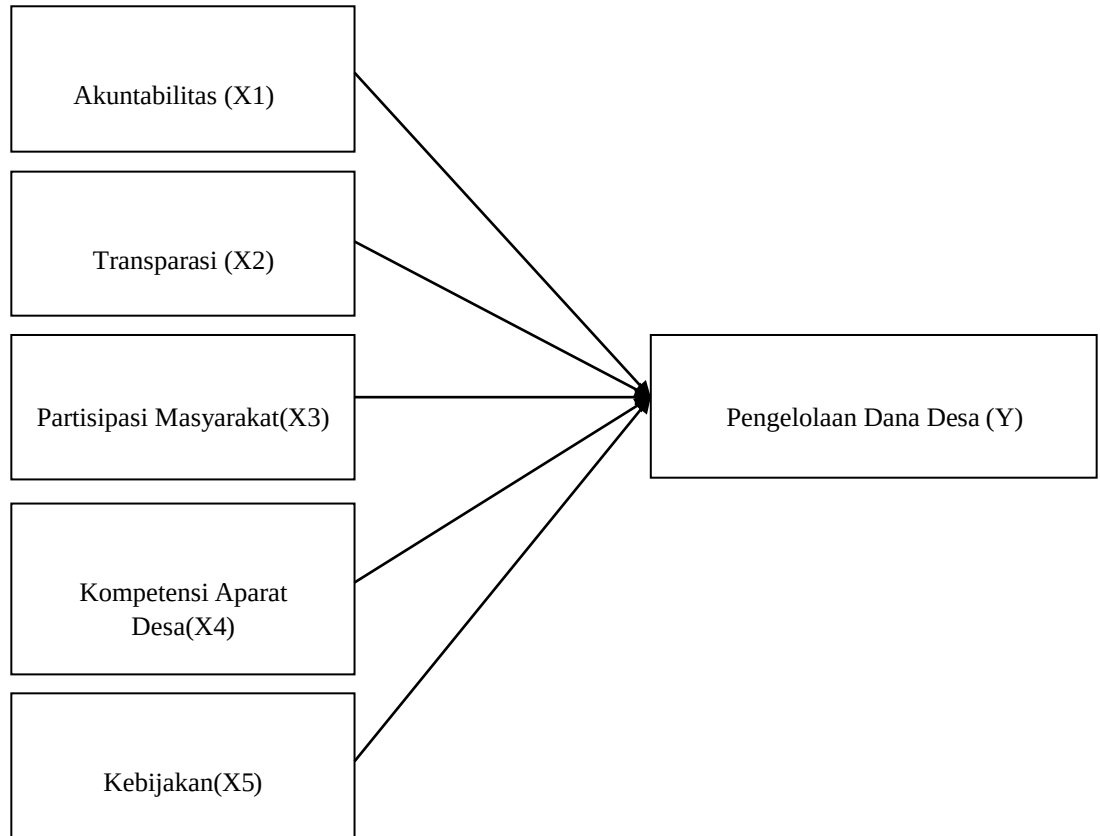
No	Penulis Dan Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Hasil

1	A.Rakhma Larasati P, Maryono. (2022)	Pengaruh Transparasi Akuntabilitas Partisipasi Masyarakat dan Kompetisi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa	Transparasi, Akuntabilitas, Partisipasi, Kompetisi	Pengelolaan Dana Desa	Akuntabilitas Partisipasi Masyarakat dan Kompetisi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.
2	R.Amrullah (2019)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa	Akuntabilitas dan Transparansi	Pengelolaan Dana Desa	Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh positif terhadap Pengelolaan dana desa.
3	N.Asia Usman B, P.Ika Nugroho (2021)	Akuntabilitas dan Trasnparansi Pengelolaan Dana Desa	Akuntabilitas dan Transparansi	Pengelolaan Dana Desa	Bahwa setiap tahapan Kepala Desa bersama sekretaris dan bendahara telah melibatkan masyarakat secara terbuka. Laporan pertanggungjawa ban dapat diakses oleh masyarakat. Tahapan perencanaan dan eksekusi telah melibatkan tokoh masyarakat,
					kepala kampung, tokoh pemuda, dan elemen lainnya. Tahapan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawa ban dilakukan oleh bendahara

					serta sekretaris desa.
4	E.Yanto, Aqfir (2020)	Pengaruh Transparansi Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa	Transparansi Partisipasi Akuntabilitas	Kinerja pengelolaan alokasi dana desa	Bahwa tidak ada pengaruh simultan dan signifikan antara transparansi partisipasi dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan dana desa.
5	A.Avellyni Leda M (2021)	Pengaruh Akuntabilitas Transparansi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa	Akuntabilitas Transparansi dan Pengawasan	Pengelolaan Dana Desa	Bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa, transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, dan pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.
6	I Made Yoga D.P (2019)	Pengaruh Akuntabilitas Transparansi dan Partisipasi Masyarakat pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	Akuntabilitas Transparansi dan Partisipasi	Efektivitas pengelolaan dana desa	Bahwa Akuntabilitas Transparansi dan Partisipasi berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa.
7	I.Ngakil,	Transparansi	Transparansi	Pengelolaan	Bahwa

	M.Elfan K. (2018)	dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo	dan akuntabilitas	Keuangan Desa	pengelolaan keuangan desa yang ada selama ini sudah dikelola secara optimal dengan mendapatkan transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan.
8	C.Yunnita G.,L.Lomi Ga. (2020)	Pengaruh akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian GOOD GOVERNANCE Desa Manuela Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka	Akuntabilitas dan Transparansi	Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Bahwa akuntabilitas transparansi secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

3. Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Keterangan:

Dari skema kerangka pikir diatas, terlihat 2 (Dua) variabel yaitu:

1. Variabel Independen (Bebas)

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen dimasukkan dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas (X1), Transparasi (X2), Partisipasi Masyarakat (X3), Kompetensi Aparat Desa (X4), dan Kebijakan (X5).

2. Variabel Dependen (Terikat)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Pada penelitian ini variabel terikatnya adalah Pengelolaan Dana Desa (Y).

4. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban yang mungkin untuk masalah yang disajikan. (Muri Yusuf, 2021) mendefinisikan hipotesis sebagai kesimpulan tentatif atau jawaban tentatif dan konstruksi masalah penelitian oleh seorang peneliti yang mengungkapkan hubungan antara dua variabel atau lebih.

1) Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban oleh organisasi pemerintah dalam mengelola sumber daya public, kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian yang dilakukan Emylia L, Titik Mildawati (2019) menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dana desa yang baik akan membuat masyarakat mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintahan desa, kepercayaan yang tinggi dalam mengelola keuangan dan desa dan mampu menepis kecurigaan maupun menyelesaikan permasalahan yang ada didalam pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada pemerintahan desa akan semakin mendorong kinerja pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya, sehingga akan memberikan kenyamanan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam pemerintah desa mengemban tugasnya sebagai pengelola keuangan desa yang dipercaya masyarakat dengan dasar peraturan-peraturan yang ditentukan. Beberapa penelitian terdahulu yang mendukung dan menyatakan akuntabilitas pengelolaan

keuangan desa yang baik mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

H1 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa

2) Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Transparansi merupakan penyedia informasi yang terbuka baik mengenai informasi keuangan maupun kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan menjamin akses informasi tersebut bagi setiap masyarakat desa. L. Yohanes Antonius, Asih Widi Lestari (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa partisipasi dan transparansi sebagai dua sisi mata uang. Ketika masyarakat terlibat (berpartisipasi) maka secara otomatis prinsip transparansi sudah dapat terpenuhi. Keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat dalam mengelola sumber daya keuangan dengan memberikan informasi melalui berbagai media agar masyarakat atau unit yang membutuhkan informasi dapat dengan mudah mengaksesnya. Informasi yang dimiliki oleh desa khususnya dana desa sangat perlu diperhatikan dan dimanfaatkan. Transparansi membangun kepercayaan masyarakat ketika masyarakat dilibatkan dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pembiayaan kegiatan pembangunan desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

H2 : Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa

3) Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Theresia *et all* (2015;196) mengatakan pengertian dasar partisipasi adalah tindakan mengambil bagian dalam kegiatan, sedangkan pengertian partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan di mana masyarakat ikut terlibat mulai dari tahap penyusunan dan program, perencanaan dan pembangunan,

perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan. Ketika komunitas berpartisipasi, seseorang harus berusaha untuk menjadi sah, responsif dan bertanggung jawab. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan kesempatan yang jelas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan dengan membuat proses pengambilan keputusan yang transparan dan selaras dengan opini publik.

H3 : Partisipasi Masyarakat berpengaruh Terhadap Pengelolaan Dana Desa

4) Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Kompetensi aparat desa sangat diperlukan agar pengelolaan dana desa dapat berkembang dalam berbagai aspek. Untuk itu dalam pelaksanaannya, aparatur desa harus mempunyai kecerdasan pengetahuan dan ketrampilan yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab aparatur desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa (Widiawaty, 2019).

Pengetahuan tentang mesin desa merupakan salah satu unsur utama pembangunan desa dan kemajuan desa. Oleh karena itu, mesin desa harus memiliki kecerdasan di bidang pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan atau kepintaran aparat desa di bidangnya dapat memberikan sajian yang diinginkan. Oleh karena itu, kecerdasan dan keterampilan perangkat desa sangat besar pengaruhnya bagi pembangunan daerah.

H4 : Kompetensi Aparat Desa berpengaruh Terhadap Pengelolaan Dana Desa

5) Pengaruh Kebijakan Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Kebijakan desa merupakan termasuk dalam produk hukum, karena setiap pemerintahan desa mempunyai kewenangan hukum, sekalipun berskala kecil dan meluas sampai wilayah administrasi desa itu sendiri. Oleh karena itu desa memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan bagi desa terutama dalam hal memberikan pelayanan yang terbaik dan meningkatkan pengaruh masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2019) menjelaskan bahwa kebijakan desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan kebijakan desa yang ditetapkan oleh pemerintah desa mampu memberikan layanan yang baik dan berperan serta dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana desa berperan penting dalam membentuk kebijakan pembangunan infrastruktur desa dan melaksanakan kegiatan atau program desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

H5 : Kebijakan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa

6) Pengaruh Akuntabilitas, Transparasi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparat Desa, dan Kebijakan Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Penelitian ini ingin mengetahui tentang pengaruh variabel secara simultan terhadap variabel dependen. Akuntabilitas, Transparasi, dan Kebijakan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Akuntabilitas, Transparasi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparat Desa, dan Kebijakan Terhadap Pengelolaan Dana Desa secara bersama-sama mempengaruhi terhadap kesejahteraan masyarakat. Hubungan Akuntabilitas, Transparasi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi

Aparat Desa, dan Kebijakan yaitu, Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban oleh organisasi pemerintah dalam mengelola sumber daya public, kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Transparasi dapat dikatakan pemberi informasi yang terbuka baik itu mengenai informasi keuangan maupun kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah desa juga menjamin adanya akses bagi setiap masyarakat desa memperoleh informasi tersebut, Partisipasi masyarakat sebagai keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan yang didorong oleh kesadaran tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam hal tersebut, Kompetensi Aparat Desa merupakan salah satu unsur utama dalam pengembangan dan kemajuan desa. Sehingga aparatur desa harus memiliki kecerdasan dari bidang pengetahuan maupun ketrampilan. Pengetahuan atau kecerdasan yang dimiliki aparatur desa yang sesuai dengan bidangnya dapat menghasilkan kinerja yang diinginkan. serta Kebijakan merupakan salah satu produk hukum karena setiap pemerintah desa secara hukum mempunyai kewenangan meskipun berskala kecil yang mencakup wilayah administrasi desa itu sendiri. Oleh karena itu, desa mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan mengenai desa, terutama dalam memberikan pelayanan yang terbaik, peningkatan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan pengelolaan dana desa. Dengan hal tersebut maka semua pihak harus berkolaborasi agar pengelolaan dana desa lebih berdampak baik untuk lingkungan masyarakat di desa Sanggung.

H6 : Akuntabilitas, Transparasi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparat Desa, dan Kebijakan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono tidak ada cara yang mudah untuk menentukan berapa lama penelitian dilaksanakan. Tetapi lamanya penelitian akan tergantung pada keberadaan sumber data dan tujuan penelitian. Selain itu, juga tergantung pada ruang lingkup penelitian dan bagaimana peneliti mengatur waktu yang dihabiskan.

Objek penelitian ini yaitu pemerintah desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa khususnya aparat desa serta perangkat yang membantu kepala desa dalam melaksanakan tugasnya, meliputi sekretaris desa, bendahara, kaur – kaur desa, serta peran masyarakat umum.

Tempat penelitian dilakukan di Kantor Desa Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo. Alasan peneliti memilih tempat penelitian karena masih wilayah tempat tinggal peneliti dan juga agar bisa memudahkan peneliti melakukan penelitian ini.

2. Jenis Penelitian dan Sumber Data

1) Jenis Penelitian

Melakukan penelitian pada sebuah masalah, diperlukan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui bagaimana langkahlangkah yang dilakukan dalam penelitian untuk pemecahan masalah dari objek yang sedang diteliti dengan maksud agar tujuan dapat tercapai.

Menurut Sugiyono (2020:2). Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif dan analisis verifikatif, karena terdapat variabel-variabel yang akan ditelaah hubungannya serta tujuannya untuk gambaran secara terstruktur, faktual, mengenai fakta-fakta hubungannya antara variabel yang diteliti. Metode kuantitatif dalam Sugiyono (2020:16) Artinya, metode penelitian berdasarkan filosofi positivisme, digunakan untuk mempelajari populasi sampel yang diberikan, pengumpulan data melalui alat penelitian, analisis data kuantitatif atau statistik, yang tujuannya adalah untuk menguji hipotesis yang diajukan. Penelitian yang akan dilakukan adalah metode penelitian kuantitatif, karena informasi yang diperlukan tentang objek penelitian ini adalah data yang dinyatakan dalam angka-angka yang merupakan hasil penghitungan dan pengukuran nilai setiap variabel.

2) Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dimana menurut Anwar Sanusi (2011) menyatakan data primer merupakan data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan peneliti. Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud adalah jawaban dari kuisioner yang disebarkan kepada aparat desa yang mengelola dana desa di wilayah Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.

3. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Menurut Handayani (2020) populasi adalah penjumlahan dari setiap unsur yang diteliti yang memiliki sifat yang sama, bisa berupa kelompok individu, peristiwa atau objek kajian. Populasi penelitian ini terdiri dari 14 desa di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo. Meliputi perangkat dan perangkat desa seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara, kepala desa dan peran masyarakat.

2) Sampel

Sugiyono (2017) menyatakan Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampling yang digunakan adalah non-probability sampling. Non-Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau peluang yang sama bagi setiap item atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Convenience sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana semua anggota populasi diwawancarai. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah perangkat desa di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo sebanyak 112 responden dari 14 desa di kecamatan tersebut.

Tabel 2 . Jumlah responden

No	Nama Kelurahan	Jumlah Aparat Pengelola Dana Desa
1	Sanggung	10
2	Kagokan	9
3	Blimbing	9
4	Krajan	8
5	Geneng	10
6	Jati	7
7	Trosemi	7
8	Luwang	7
9	Klaseman	10
10	Tempel	7
11	Sraten	6
12	Wironanggan	6
13	Trangsan	10
14	Mayang	7
	Jumlah	112

Sumber data : Seksi Pemerintahan Kecamatan

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan keterangan lain dalam kajian terhadap masalah yang diteliti (Sugiyono, 2017), dan menyatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah utama penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh informasi..

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

- 1) Observasi, dirancang untuk mengumpulkan informasi melalui pengamatan langsung oleh peneliti terhadap obyek kajian .
- 2) Kuesioner digunakan untuk mengetahui secara pasti dampak akuntabilitas, transparansi dan politik terhadap pengelolaan dana desa.

3) Skala likert dimana:

Tabel 3. Skala Likert

Simbol	Skor
STS (Sangat Tidak Setuju)	1
TS (Tidak Setuju)	2
RR (Ragu-Ragu)	3
S (Setuju)	4
SS (Sangat Setuju)	5

4. Definisi Operasional

Sugiyono (2017) menyatakan bahwa variabel adalah atribut, properti atau nilai seseorang, objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.

1) Variabel Dependen

Merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena ada variabel bebas (Sugiyono, 2015:97). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pengelolaan dana desa. keuangan desa, yaitu pengelolaan, adalah keseluruhan operasi yang meliputi perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengendalian keuangan desa (Bastian, 2015:)

2). Variabel Independen (bebas)

Variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab terjadinya perubahan atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini variabel independennya adalah akuntabilitas, Transparansi, partisipasi masyarakat, kompetensi perangkat desa dan Praktik.

Tabel 4. Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	X1= Akuntabilitas	Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sumber : Fajri (2015)	1 Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum Akuntabilitas 2 manajerial 3 Akuntabilitas program 4 Akuntabilitas finansial Sumber Mahmudi,2015
2	X2= Transparansi	Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keuangan daerah. Transpransi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.	1. Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Sumber : Perarutan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005

		Sumber : Menurut Hamid (2016)	
3	X3= Partisipasi Masyarakat	Partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan emosi orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan pada tujuan-tujuan kelompok dan sama – sama bertanggung jawab terhadapnya. Sumber : Theresia <i>et all</i> (2015;196	1. Keterlibatan pengambilan keputusan program desa, 2. Mengusulkan rencana anggaran 3. Terlibat mengawasi dan melaporkan, Sumber : Tasya,2019)
4	X4= Kompetensi Aparat Desa	Kompetensi aparat desa sangat diperlukan agar pengelolaan dana desa dapat berkembang dalam berbagai aspek. Untuk itu dalam pelaksanaannya, aparatur desa harus mempunyai kecerdasan pengetahuan dan ketrampilan yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab aparatur desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa Sumber : (Widiawaty, 2019).	1. Kecerdasan pengetahuan 2. Ketrampilan dalam bekerja 3. Tanggungjawab dalam melakukan kegiatan Sumber : (Widiawaty,2019)
5	X5=Kebijakan	Kebijakan adalah suatu ketentuan dan pedoman yang dianut dan ditentukan dalam melaksanakan suatu	1. Ketentuan dalam melaksanakan kegiatan 2. Pedoman hukum sesuai dengan yang berlaku Sumber : (Dura,2016)

		program atau kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan kebijakan desa adalah salah satu produk hukum karena setiap pemerintah desa secara hukum memiliki hak atau wewenang meskipun berskala kecil yang mencakup wilayah administrasi desa itu sendiri Sumber : (Dura, 2016).	
6	Y= Pengelolaan Dana Desa	Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sumber : Permendgari Nomor 113 Tahun 2014,	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Penatausahaan 4. Pelaporan 5. Pertanggungjawaban Sumber : Permendgari Nomor 113 Tahun 2014,

6) Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengumpulan, pemodelan, dan transformasi data dengan tujuan memilah dan memperoleh informasi yang berguna untuk keputusan penelitian (Saban Echdar, 2017). Supaya kesimpulan menjadi valid, maka data yang diperoleh sebaiknya di uji terlebih dahulu kelayakannya dengan menggunakan uji validitas dan reabilitas, uji asumsi klasik dengan uji normalitas, uji multikolo-nieritas serta uji hipotesis (Zulganef,2013).

1) Uji Validitas dan Uji Reabilitas

Validitas dan reliabilitas merupakan karakteristik penting dalam ilmu perilaku karena validitas dan reliabilitas memberikan gambaran tentang ketelitian dan ketepatan pengukuran peneliti terhadap variabel-variabel yang diukur (Saban Echdar, 2017).

a) Uji Validitas

Uji validitas mengukur validitas atau (akurasi) atau ketidakabsahan suatu pertanyaan dalam suatu kuesioner untuk mengungkapkan apa yang diukur oleh kuesioner tersebut (Andri Nurtianto, 2020:178)

b) Uji Reabilitas

Uji reliabilitas mengukur apakah jawaban responden setuju dengan pertanyaan dalam kuesioner (Andri Nurtianto, 2020:178).

2) Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik merupakan analisis yang diperlukan untuk penelitian yang menggunakan statistik inferensial, khususnya statistik parametrik. Uji Asumsi Klasik dapat dijelaskan melalui Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Multikolinearitas, Uji tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

a) Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah sebaran data tersebut normal atau tidak. Uji normalitas membandingkan data sampel dengan data yang terdistribusi normal dengan mean dan standar deviasi yang sama dengan data yang diuji. (Haryadi dan Winda, 2011)

b) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menunjukkan bahwa varian suatu variabel tidak sama pada semua pengamatan atau pengamatan. Jika variansi dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya sama, maka dikatakan homoskedastik. Model regresi yang baik adalah ada tidaknya homoskedastisitas dalam model tersebut heteroskedastisitas (Haryadi dan Winda, 2011)

c) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi menemukan koreksi antar variabel independen (berdaulat). Salah satu cara untuk melihat multikolinearitas adalah dengan melihat faktor toleransi dan inflasi varians (VIF). Toleransi

mengukur variasi variabel independen terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya (Nurkhasanah, 2019).

3) Uji Kelayakan Model

a) Uji F

Uji F digunakan untuk menguji signifikan secara simultan antara variabel independen yaitu Akuntabilitas (X_1), Transparansi (X_2), Partisipasi Masyarakat (X_3), Kompetensi Aparat Desa (X_4), dan Kebijakan (X_5) terhadap dependen Pengelolaan Dana Desa (Y). Selanjutnya untuk menguji hipotesis pada uji F digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- i. Quick Look: Bila nilai F lebih besar dari 4 maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 10%. Dengan kata lain kita menerima hipotesis yang sebagai alternative yang menyatakan bahwa serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- ii. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut table. Maka H_0 ditolak dan menerima H_a .

b) Uji Koefisien Determinasi Adjusted R^2

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel terikat. Nilai Determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang terkecil berarti kemampuan variabel-variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data sampling tepat relative rendah karena

adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtut waktu biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Kuncoro,2009).

c) Uji t

Uji t merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel bila datanya berada pada skala interval atau rasio. T (test) merupakan salah satu bentuk statistic parametrics karena menguji data pada skala interval atau rasio (Nanang Martono,2012). Sugiyono (2012) menjelaskan cara melakukan uji t adalah sebagai berikut:

- i. Quick Look: bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 10% maka H_0 yang $b_i =$ dapat ditolak bila t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut) dengan kata lain menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.
- ii. Membandingkan nilai statistic t dengan titik kritis menurut table. Apabila statistic t hasil lebih tinggi dibandingkan nilai table. Kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

4) Uji Hipotesis

Sugiyono (2015) menyatakan dalam penelitian, Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah tersebut bisa berupa pertanyaan tentang

hubungan variabel atau lebih, perbandingan (komparasi) atau variabel mandiri (deskripsi).

Model regresi penelitian ini adalah:

$$Y = a + \beta_1 \cdot X_1 + \beta_2 \cdot X_2 + \beta_3 \cdot X_3 + \beta_4 \cdot X_4 + \beta_5 \cdot X_5 \dots + e$$

Keterangan :

Y= Pengelolaan Dana Desa

A= Konstanta

b_1, b_2, b_3, b_4, b_5 = koefisien regresi, yaitu besarnya perubahan yang terjadi pada Y jika satu unit perubahan pada variabel bebas (Variabel X_1, X_2, X_3, X_4, X_5)

X_1 = Akuntabilitas

X_2 = Transparansi

X_3 = Partisipasi Masyarakat

X_4 = Kompetensi Aparat Desa

X_5 = Kebijakan

BAB IV

Analisis Dan Pembahasan

a) Deskripsi Objek Penelitian



Gambar 2. Peta Gatak

Sumber. Ppp-gatak-skx-blogspot.com

Luas Wilayah Kecamatan Gatak pada tahun 2020 tercatat 1.937 Ha atau 3,96 persen dari luas Kabupaten Sukoharjo menurut Permendagri No 72 Tahun 2019. Bersumber dari Dinas Pertanian Kecamatan, luas yang ada terdiri dari 1 189 Ha Lahan Sawah, Pekarangan 585 Ha serta Lainnya 173 Ha. Dibandingkan dengan tahun 2020 luas lahan sawah tidak mengalami perubahan Luas Bukan Lahan Sawah yang yang seluas 763 ha dipakai untuk pekarangan sebesar 585 ha atau sekitar 73.1 persen dan untuk lainnya sebesar 26.9 persen. Kecamatan Gatak terletak di dataran tinggi, dengan tinggi 118 m diatas permukaan laut. Jarak dari Barat ke Timur + 8,5 Km, Jarak dari Utara ke Selatan + 7,0 Km, Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten Sukoharjo + 24 Km.

Batas - batas Kecamatan :

Sebelah Utara : Kecamatan Kartasura

Sebelah Timur : Kecamatan Baki

Sebelah Selatan : Kec. Wonosari Kab.Klaten

Sebelah Barat : Kec.Sawit Kab Boyolali

Keadaan Iklim Banyaknya hari hujan dalam 1 (satu) tahun ada 122 hari.

Banyak curah hujan tertinggi di bulan Desember yaitu sebesar 299. Kecamatan Gatak Terdiri dari 14 Desa, yakni : 1. Wironanggan 2. Kagokan 3. Klaseman 4. Krajan 5. Trosemi 6. Luwang 7. Tempel 8. Mayang 9. Sanggung 10. Sraten 11. Trangsan 12. Geneng 13. Jati 14. Blimbing

b) Identitas Responden A. Sanggung

Desa Sanggung adalah desa di kecamatan Gatak Sukoharjo Jawa Tengah dengan kode pos 57557, dan kode Kemendagri adalah 33.11.11.2002, memiliki lembaga pendidikan formal antara lain: SD Negeri Sanggung 01, TK Sanggung 01, PAUD Puspurini, SD Sanggung 02, TK Sanggung 02, SMK Kesehatan Citra Medika. Desa Sanggung terdiri satu dukuh saja yaitu dukuh Sanggung dengan jumlah penduduk 1998 jiwa.



Gambar 3. Sumber.Wikipedia.co.

B. Kagokan

Desa Kagokan adalah desa di kecamatan Gatak Sukoharjo Jawa Tengah dengan kode pos 57557, dan Kode Kemendagri 33.11.11.2002, memiliki lembaga pendidikan formal antara lain : SD Kagokan 01, SD Kagokan 02. Desa Kagokan terdiri dari beberapa dukuh yaitu : Kagokan, Krasak, Kwojo, Nyaen, Padangan, dan Sendang.



Gambar 4. Sumber.Wikipedia.co.

C. Blimbing

Desa Blimbing adalah desa di kecamatan Gatak Sukoharjo Jawa Tengah dengan kode pos 57557, dan Kode Kemendagri 33.11.11.2002, memiliki lembaga pendidikan formal antara lain : SD Blimbing 01, SD Blimbing 02, SD Blimbing 03, SD Blimbing 04, SMP Muhammdiyah PK Blimbing, SMP N Gatak 1, SMP Muhammadiyah 2, SMA Muhammad Gatak 5, dan SMK N 6 Sukoharjo. Desa Blimbing terdiri dari beberapa dukuh yaitu : Bedodo, Blimbing, Boto, Botorejo, Brambang, Gatak, Karangijo, Klopogading, dan Tempel.



Gambar 5. Sumber.Wikipedia.co.

D. Krajan

Desa Krajan adalah desa di kecamatan Gatak Sukoharjo Jawa Tengah dengan kode pos 57557, dan Kode Kemendagri 33.11.11.2002, memiliki lembaga pendidikan formal antara lain : SD Krajan 01, SD Krajan 02, dan SD Krajan 04. Desa Krajan terdiri dari beberapa dukuh yaitu : Babosan, Bulurejo, Kauman, Kopen, Krajan, Sanggrahan, Sidoari, Sidosari, Teblon, Tempelsari, dan Yagan.



Gambar 6. Sumber. Wikipedia.co.

E. Geneng

Desa Geneng adalah desa di kecamatan Gatak Sukoharjo Jawa Tengah dengan kode pos 57557, dan Kode Kemendagri 33.11.11.2002, memiliki lembaga pendidikan formal antara lain : SD Negeri Geneng 01, dan SD Negeri Geneng 02. Desa Geneng terdiri dari beberapa dukuh yaitu : Gawok, Kaworan, Geneng, Klenisan, Krangan, Kutan, Senden, Sigran, dan Tegal Krecekan.



Gambar 7. Sumber. Wikipedia.co.

F. Jati

Desa Jati adalah desa di kecamatan Gatak Sukoharjo Jawa Tengah dengan kode pos 57557, dan Kode Kemendagri 33.11.11.2002, memiliki lembaga pendidikan formal antara lain : SD Jati 01, SD Jati 02. Desa Jati terdiri dari beberapa dukuh yaitu : Bareng, Daleman, Jati, Kidul Pasar, Nampan, Salam, Sranon, dan Temepl.



Gambar 8. Sumber.Wikipedia.co.

G. Trosemi

Desa Trosemi adalah desa di kecamatan Gatak Sukoharjo Jawa Tengah dengan kode pos 57557, dan Kode Kemendagri 33.11.11.2002, memiliki lembaga pendidikan formal antara lain : SD Trosemi 01, SD Trosemi 02.

Desa Trosemi terdiri dari beberapa dukuh yaitu : Banaran, Bangsan, Brante, Kembang, Kradenan, Kujon, Tempolan, dan Trosemi.



Gambar 9. Sumber.Wikipedia.co.

H.Luwang

Desa Luwang adalah desa di kecamatan Gatak Sukoharjo Jawa Tengah dengan kode pos 57557, dan Kode Kemendagri 33.11.11.2002, memiliki lembaga pendidikan formal antara lain : SD N Luwang, MI Muhammadiyah Luwang. Di Desa ini terdapat Stasiun Gawok yang melayani perjalanan KRL Commuter Line Solo-Yogyakarta. Desa Luwang terdiri dari beberapa dukuh yaitu : Bangakan, Blimbing, Gesingan, Luwang, Ngoro-ngoro, dan Tumpeng.



Gambar 10. Sumber.Wikipedia.co.

I. Klaseman

Desa Klaseman adalah desa di kecamatan Gatak Sukoharjo Jawa Tengah dengan kode pos 57557, dan Kode Kemendagri 33.11.11.2009, memiliki lembaga pendidikan formal antara lain : SD N Klaseman, MI Muhammadiyah Klaseman. Desa Klasemanterdiri dari beberapa dukuh yaitu : Banaran, Dalangan, Kemloko, Klaseman, Tegal Godong, Tegalsari, dan Dimoro.



Gambar 11. Sumber.Wikipedia.co.

J. Sraten

Desa Sraten adalah desa di kecamatan Gatak Sukoharjo Jawa Tengah dengan kode pos 57557, dan Kode Kemendagri 33.11.11.2002, memiliki lembaga pendidikan formal antara lain : SD N Sraten 01, SD N Sraten 02, MI Muhammadiyah Sraten. Desa Sraten terdiri dari beberapa dukuh yaitu : Hargosari, Karangasem, Klewer, Maron, Piji, Salakan, Sampang, Sraten.



Gambar 12. Sumber.Wikipedia.co.

K. Wironanggan

Desa Wironanggan adalah desa di kecamatan Gatak Sukoharjo Jawa Tengah dengan kode pos 57557, dan Kode Kemendagri 33.11.11.2002, memiliki lembaga pendidikan formal antara lain : SD N Wironanggan 01, SD N Wironanggan 02, MI GUPPI Wironanggan. Desa Wironanggan terdiri dari beberapa dukuh yaitu : Cangakan, Godong, Karangko, Krecekan, Pusposari, Tegal, Wironanggan.



Gambar 13. Sumber.Wikipedia.co

L. Trangsang

Desa Trangsang adalah desa di kecamatan Gatak Sukoharjo Jawa Tengah dengan kode pos 57557, dan Kode Kemendagri 33.11.11.2002, memiliki lembaga pendidikan formal antara lain : SD N Trangsang (01,02,03,dan 04), MI Muhammadiyah 2 Gatak, SMP Negeri 2 Gatak, SMP Al Islam Gatak.

Desa Trangsang terdiri dari beberapa dukuh yaitu : Botokan, Dagangan, Dukuh, Gadingan, Galan, Jamur, Jogahan, Kramat, Ledok,

Ledoksari, Mulyosari, Slarong, Sudan, Tegal Terik, Terik Warung, Teriklo, dan Trangsang.

Desa Trangsang terkenal dengan sentra kerajinan rotan terbesar di Kabupaten Sukoharjo. Selain kerajinan rotan, Trangsang terdapat sebuah stasiun Gawok yang terletak di perbatasan desa Blimbing.



Gambar 14. Sumber.Wikipedia.co.

M. Tempel

Desa Tempel adalah desa di kecamatan Gatak Sukoharjo Jawa Tengah dengan kode pos 57557, dan Kode Kemendagri 33.11.11.2002, memiliki lembaga pendidikan formal antara lain : SD N Tempel. Desa Tempel terdiri dari beberapa dukuh yaitu : Taru, Dewo, Gunungsari, Kerjan, Sidomulyo, Tegal, dan Tempel.



Gambar 15. Sumber.Wikipedia.co.

N. Mayang

Desa Mayang adalah desa di kecamatan Gatak Sukoharjo Jawa Tengah dengan kode pos 57557, dan Kode Kemendagri 33.11.11.2002, memiliki lembaga pendidikan formal antara lain : SD N Mayang, SD Kanisius Mayang, MI Muhammadiyah Mayang, SMP Muhammadiyah 1 Gatak. Desa Mayang terdiri dari beberapa dukuh yaitu : Jatran, Mayang, Ngemplak, Saripan, Serongan, Tegalgede.



Gambar 16. Sumber.Wikipedia.co.

c) Analisis Data

A. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang menyajikan gambaran menyeluruh tentang suatu fenomena atau kenyataan dengan menggunakan metode menggambarkan beberapa variabel yang berkaitan dengan masalah dan variabel yang diuji. Responden penelitian ini adalah seluruh pegawai, kolaborator, bumdes dan organisasi Desa Sanggung. Jumlah populasi seluruh

kantor Desa di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo sebanyak 112 orang, dari jumlah tersebut maka dapat diambil dengan menggunakan teknik sampling jenuh (sensus) yaitu apabila jumlah populasi yang digunakan relatif kecil, dimana semua elemen populasi dapat dijadikan sample. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 112 orang.

1. Responden berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 5.
Responden berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	jumlah	Prosentase
perempuan	29	34,60%
laki – laki	83	65,40%

Sumber: Data Primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas responden adalah laki-laki dengan jumlah 83 orang dengan prosentase (65,40%) dan perempuan berjumlah 29 orang dengan nilai prosentase (34,60%).

2. Responden berdasarkan program umur sebagai berikut:

Tabel 6.
Responden berdasarkan umur

Umur	Jumlah	Prosentase
23 - 30 Tahun	12	6,8%
31 – 35 Tahun	28	23,30%
36 > Tahun	72	69,90%

Sumber: Data Primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa responden yang berusia 23 – 30 tahun yaitu 12 orang dengan nilai prosentase (6,8%), yang berusia 31 – 35 tahun yaitu 28 orang dengan nilai prosentase (23,30%) dan dengan usia 36 keatas tahun yaitu 72 orang dengan nilai prosentase (69,90%).

3. Responden berdasarkan lokasi bekerja sebagai berikut:

Tabel 7.
Responden berdasarkan lokasi bekerja

Nama Lokasi Bekerja	Jumlah	Prosentase
Sanggung	10	8,30%
Kagokan	9	7,50%
Blimbing	9	7,50%
Krajan	8	6,80%
Geneng	10	8,30%
Jati	7	7,50%
Trosemi	7	7,50%
Luwang	7	7,50%
Klaseman	10	8,30%
Tempel	7	7,50%
Sraten	6	6,80%
Wironanggan	6	6,80%
Trangsan	10	8,30%
Mayang	7	7,50%

Sumber: Data Primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa responden paling banyak yang menjawab yaitu pada wilayah Sanggung, Geneng, Klaseman dan Treangsan yaitu 40 orang dengan nilai prosentase (36,20%), lalu yang menjawab dengan jumlah 18 orang dengan wilayah Kagokan dan Blimbing nilai prosentase (21,80%), lalu di ikuti dengan jumlah 7,8,6 sebagai orang berjumlah sebesar 53 orang dengan nilai prosentase sebesar (43,00%).

B. Hasil Pengujian Instrumen Penelitian.

1. Uji Validitas

Pada uji validitas dilakukan pengukuran validitas kuesioner, pada uji validitas peneliti menggunakan program SPSS 23.H dengan koefisien skor masing-masing total variabel. Item kuisisioner dapat dikatakan vailid apabila $r_{hitung} \geq r_{tabel}$. Pada penelitian ini jumlah data yang digunakan untuk vailiditas

adalah 112 responden. Berdasarkan r tabel dapat dilihat bahwa r_{tabel} untuk 112 dengan taraf signifikan 0,05 (5%) adalah 0,1562.

Tabel 8.
Uji Validitas

Variabel	R	R	Interpretasi
hitung table Akuntabilitas			
A1	0,719	0,1562	Vailid
A2	0,628	0,1562	Vailid
A3	0,313	0,1562	Vailid
A4	0,485	0,1562	Vailid

A5	0,569	0,1562	Vailid
A6	0,216	0,1562	Vailid
A7	0,739	0,1562	Vailid
A8	0,638	0,1562	Vailid

		0,1562	Vailid
Transparansi		0,1562	Vailid

T1	0,512	0,1562	Vailid
T2	0,494	0,1562	Vailid

T3	0,594		
T4	0,568		Vailid

		0,1562	Vailid
		0,1562	Vailid

		0,1562	Vailid
Partisipasi		0,1562	Vailid

		0,1562	Vailid
P1	0,793	0,1562	Vailid

P2	0,841	0,1562	
P3	0,829		Vailid

P4	0,74		Vailid
P5	0,853	0,1562	Vailid

P6	0,853	0,1562	Vailid
		0,1562	

		0,1562	
Kompetensi		0,1562	Vailid

K1	0,331		Vailid
K2	0,50	0,1562	Vailid

K3	0,640	0,1562	
K4	0,533	0,1562	

K5	0,424		Vailid
			Vailid

		0,1562	Vailid
Kebijakan		0,1562	Vailid

		0,1562	Vailid
KB1	0,531	0,1562	

KB2	0,605	0,1562	
KB3	0,678		

		0,1562	Vailid
		0,1562	Vailid

		0,1562	Vailid
Pengelolaan			

Dana			
P1	0,391		

P2	0,723		
P3	0,668		

P4	0,721
P5	0,551

Sumber: Data primer yang diolah

Dari hasil uji validitas pada tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa semua butir variabel dinyatakan valid karena r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} (0,1562) pada taraf signifikan 5%, artinya bahwa semua pertanyaan memiliki korelasi semua sehingga dinyatakan semua pertanyaan valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menentukan konsistensi nilai dalam penelitian, dapat dikatakan uji reliabilitas reliabel jika dilakukan beberapa kali dengan hasil yang sama, sehingga dapat dikatakan nilainya konstan Pengujian ini peneliti menggunakan dengan *Cronbach's Alpha* yaitu untuk mengetahui tingkat reability dari variabelvariabel penelitian, jika nilai *Cronbach's Alpha* semakin mendekati angka 1 maka dapat dikatakan semakin konsisten hasil reabilitynya.

Suatu variabel dapat dikatakan reabel apabila nilai *cronbach's alpha* (α) lebih besar dari 0,60 sebaliknya jika jika nilai *cronbach's alpha* kurang dari 0,60 maka variabel tersebut dapat dikatakan tidak reable dalam penelitian.

a) Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 9.
Uji Reliabilitas

Variabel	<i>cronbach's alpha</i>	Interpretasi
Akuntabilitas	0,705	Reliabel
Transparansi	0,670	Reliabel
Partisipasi	0,631	Reliabel
Kompetensi	0,705	Reliabel
Kebijakan	0,683	Reliabel
Pengelolaan Dana	0,761	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah

Dari uji reliabilitas pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa semua nilai *cronbach's alpha* (α) lebih besar dari 0,6 jadi dapat dikatakan semua pernyataan dalam variabel tersebut dikatakan reliabel.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik memastikan **bahwa** model regresi dapat memenuhi standar asumsi dasar sehingga dapat **diuji sebuah** hipotesis

a) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi normal atau tidak, dalam melakukan uji normalitas peneliti menggunakan *one kolmogrov-smirnov* apabila nilai probabilitas lebih besar dari $\alpha = 0,005$ maka data yang dilakukan oleh peneliti normal. Hasil uji normalitas dengan menggunakan *one kolmogrov-smirnov* sebagai berikut:

Tabel 10.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Model	Asym Sig (2-tailed)	Probabilitas	Keterangan
1	0,120	0,005	Normal

S
u
m

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui nilai Asymp.Sig (2talied) yaitu 0,120 lebih besar dari 0,05 maka dapat dijelaskan bahwa data tersebut berdistribusi normal dan dapat memenuhi persyaratan dalam uji normalitas.

b) Uji multikolenieritas

Uji multikolenieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel dependen dan variabel independen, dalam uji ini dapat dilihat dari nilai signifikan sebesar 10% (0,10). Apabila nilai VIF lebih besar 10 maka model regresi menolak H_0 , model regresi yang baik jika regersi terbebas dari multikolenieritas. Hasil uji multikolenieritas yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

Tabel 11.
Uji Multikolenieritas

Variabel	VIF	Keterangan
Akuntabilitas	4,165	Tidak terjadi gejala multikolieneritas
Transparansi	1,235	Tidak terjadi gejala multikolieneritas
Psrtisipasi	2,11	Tidak terjadi gejala multikolieneritas
Kompetensi	1,369	Tidak terjadi gejala multikolieneritas
Kebijakan	3,065	Tidak terjadi gejala multikolieneritas

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* dan *varian inflation factor* (VIF) menghasilkan nilai variabel independent terbebas dari multikolieritas yaitu dengan nilai lebih dari 0,10 maka variabel dapat dikatakan tidak ada gejala.

c) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode uji t, dalam uji autokorelasi peneliti melakukan dengan menggunakan Durbin Waston. Hasil uji autokorelasi yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 12.

Uji Autokorelasi	
Model	Durbin Waston
1	1,583

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *Durbin Waston* yaitu 1,583 dengan rumus $d_u \leq d \leq 5-d_l$ maka $1,7860 \leq 1,583 \leq 5 - 1,5999$ sehingga dalam hasil penelitian ini dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi.

d) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui terjadinya atau tidaknya heteroskedastisitas antara variabel, pada penelitian ini menggunakan metode uji Glazer yaitu sebagai berikut:

Tabel 13.
Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Unstandardized residual	Signifikan	Keterangan
Akuntabilitas	0,282	0,05	Tidak ada gejala heteroskedastisitas
Transparansi	0,307	0,05	Tidak ada gejala heteroskedastisitas
Partisipasi	0,123	0,05	Tidak ada gejala heteroskedastisitas
Kompetensi	0,120	0,05	heteroskedastisitas
Kebijakan	0,643	0,05	Tidak ada gejala Tidak ada gejala heteroskedastisitas

Sumber: data primer yang diolah

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dihasilkan nilai melalui unstandardized residual yaitu nilai X_1 , X_2 , X_3 , X_4 dan X_5 secara berturut-turut dengan perolahan angka 0,160; 0,228; 0,067; 0,487 dan 0,802 dalam hasil tersebut apabila nilai korelasi lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan model tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas,

sehingga dapat disimpulkan semua variabel tidak terjadi heteroskedastisitas karena melebihi standar 0,05.

C. Hasil Pengujian Uji Hipotesis

1. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hubungan pengaruh beberapa variabel independent terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan setelah model regresi berganda bebas dari pelanggaran asumsi klasik agar dalam pengujian dapat diinterpretasikan dengan tepat. Dari hasil penelitian ini maka dapat dihasilkan dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Keterangan:

α : Konstanta Y

Pengelolaan Dana Desa b_1, b_2, b_3, b_4, b_5 :

Nilai Koefisien Regresi

X_1 : Akuntabilitas

X_2 : Transparansi

X_3 : Partisipasi

X_4 : Kompetensi

X_5 : Kebijakan

Setelah semua variabel di olah spss 23 maka dapat dihasilkan pada tabel sebagai berikut

Tabel 14.
Hasil Agresi Linier Berganda

Variabel Independen	B	Standar Error
Konstanta	0,029	0,524
Akuntabilitas (X1)	0,160	0,028
Transparansi (X2)	0,288	0,025
Partisipasi (X3)	0,067	0,019

Kompetesi (X4)	0,427	0,026
<u>Kebijakan (X5)</u>	<u>0,802</u>	<u>0,053</u>

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disusun regresi $Y = 0,029 + 0,160_{akuntabilitas} + 0,228_{transparansi} + 0,067_{partisipasi\ masyarakat} + 0,427_{Kompetensi} + 0,802_{kebijakan} + \text{error}$ dari rumus tersbut maka dapat dijelaskan regresi sebagai berikut:

- Nilai konstanta (a) sebesar 0,029 artinya jika terdapat variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi, kompetensi dan kebijakan yang mempengaruhi pengelolaan dana desa dengan nilai konstanta sebesar -0,029.
- Nilai koefisiensi regresi pada variabel akuntabilitas X_1 sebesar 0,160 artinya apabila variabel akuntabilitas meningkat sebesar satu satuan sehingga dapat meningkatkan pengelolaan dana desa, sebesar angka 0,160 dengan asumsi bahwa variabel bebas transparansi, partisipasi, kompetensi dan keijakan dianggap tetap atau konstan.
- Nilai koefisiensi regresi pada variabel transparansi X_2 sebesar 0,228 artinya apabila variabel transparansi meningkat sebesar satu satuan sehingga dapat meningkatkan pengelolaan dana desa, sebesar angka 0,228 dengan asumsi bahwa variabel bebas akuntabilitas, partisipasi, kompetensi dan kebijakan dianggap tetap atau konstan.
- Nilai koefisiensi regresi pada variabel partisipasi X_3 sebesar 0,067 artinya apabila variabel partisipasi meningkat sebesar satu satuan sehingga dapat meningkatkan pengelolaan dana desa, sebesar angka

- 0,067 dengan asumsi bahwa variabel bebas akuntabilitas, transparansi, kompetensi dan kebijakan dianggap tetap atau konstan.
- e) Nilai koefisiensi regresi pada variabel kompetensi X_4 sebesar 0,427 artinya apabila variabel kompetensi meningkat sebesar satu satuan sehingga dapat meningkatkan pengelolaan dana desa sebesar angka 0,427 dengan asumsi bahwa variabel bebas akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan kebijakan dianggap tetap atau konstan.
- f) Nilai koefisiensi regresi pada variabel kebijakan X_5 sebesar 0,802 artinya apabila variabel kebijakan meningkat sebesar satu satuan sehingga dapat mempengaruhi pengelolaan dana desa sebesar angka 0,802 dengan asumsi bahwa variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan kompetensi dianggap bebas atau konstan.

2. Analisis Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independent secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen maka dapat dilakukan dengan cara membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} dengan melihat nilai signifikan ($Sig < 0,05$) jika nilai signifikan lebih besar maka H_1 ditolak, sebaliknya jika lebih kecil maka H_1 diterima. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diperoleh uji F sebagai berikut

Tabel 15
Uji F

	F_{hitung}	F_{tabel}	P Value	Interpreatsi
Variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi, kompetensi dan kebijakan	31,749	2,30	0,000	Signifikan

Sumber: Data primer yang diolah

Dari data tabel diatas maka diperoleh $F_{hitung} =$ sebesar 31,749 sedangkan F_{tabel} pada taraf signifikan 5% adalah 2,30 sehingga dengan angkat tersebut dapat dijelaskan $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka model regresi mengandung signifikan. Artinya variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi, kompetensi dan kebijakan berpengaruh secara simultan signifikan terhadap pengelolaan dana desa, maka dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini terbukti.

3. Analisis Uji t

Uji-t sebagian menjelaskan pentingnya variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian menggunakan hasil uji SPSS-T. Pada penelitian ini nilai t_{tabel} diperoleh melalui rumus $df = n-2$ maka dihasilkan $df = 112-2$ dengan nilai $\alpha = 0,05$ maka t_{tabel} sebesar 1,65882. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diperoleh uji t sebagai berikut:

Tabel 16.

Uji t				
Variabel	T_{hitung}	T_{tabel}	P Value	Interpreatsi
Akuntabilitas	5,673	1,65882	0,000	Signifikan
Transparansi	,113	1,65882	0,910	Tidak Signifikan
Partisipasi	3,474	1,65882	0,001	Signifikan
Kompetensi	,167	1,65882	0,867	Tidak Signifikan
Kebijakan	15,052	1,65882	0,000	Signifikan

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan pada table tersebut maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Variabel akuntabilitas memiliki nilai t_{hitung} sebesar 5,673 dengan p value = 0,000 maka untuk mengukur tingkat signifikan variabel dengan angka

konstan sebesar 0,05 (5%) pada uji p value. Dalam perbandingan $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan nilai angka sebesar $5,673 < 1,65882$ maka H_0 ditolak H_a diterima begitu pula sebaliknya, dari variabel akuntabilitas pada tabel diatas maka variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa secara parsial. Maka hipotesa dalam penelitian ini terbukti.

b. Variabel transparansi memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,113 dengan p value = 0,910 maka untuk mengukur tingkat signifikan variabel dengan angka konstan sebesar 0,05 (5%) pada uji p value. Dalam perbandingan $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan nilai angka sebesar $0,113 > 1,65882$ H_0 ditolak H_a diterima begitu pula sebaliknya, dari variabel transparansi pada tabel diatas maka variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pengelolaan dana des. Maka hipotesa dalam penelitian ini tidak terbukti.

c. Variabel partisipasi memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,474 dengan p value = 0,001 maka untuk mengukur tingkat signifikan variabel dengan angka konstan sebesar 0,05 (5%) pada uji p value. Dalam perbandingan $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan nilai angka sebesar $3,474 < 1,65882$ maka H_0 ditolak H_a diterima begitu pula sebaliknya, dari variabel partisipasi pada tabel diatas maka variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa secara parsial. Maka hipotesa dalam penelitian ini terbukti.

d. Variabel kompetensi memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,167 dengan p value = 0,867 maka untuk mengukur tingkat signifikan variabel dengan angka konstan sebesar 0,05 (5%) pada uji p value. Dalam

perbandingan $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan nilai angka sebesar $0,167 > 1,6882$ H_0 ditolak H_a diterima begitu pula sebaliknya, dari variabel kompetensi pada tabel diatas maka variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pengelolaan dana desa secara parsial. Maka hipotesa dalam penelitian ini tidak terbukti.

e. Variabel kebijakan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 15,052 dengan p value = 0,000 maka untuk mengukur tingkat signifikan variabel dengan angka konstan sebesar 0,05 (5%) pada uji p value. Dalam perbandingan $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan nilai angka sebesar $15,052 < 1,6882$ maka H_0 diterima H_a ditolak begitu pula sebaliknya, dari variabel kebijakan pada tabel diatas maka variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pengelolaan dana desa secara parsial. Maka hipotesa dalam penelitian ini terbukti.

4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini dilakukan untuk menunjukkan kemampuan seberapa pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen. Nilai koefisiensi determinasi adalah diantara 0-1, jika nilai koefisiensi determinasi sama dengan 0 ($R^2=0$), maka dapat diartikan variabel dependen tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen dan ($R^2=1$) maka variabel dependen dapat menjelaskan oleh variabel independent.

Pada uji R^2 dapat dijelaskan melalui tabel berikut.

Tabel 17. Uji R^2

Model	R ₂	Adjusted R Square	KD
1	0,937	0,934	93%

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan hasil uji R^2 diatas maka dihasilkan nilai koefisien determinasi *Adjusted R²* sebesar 0,937 sehingga dapat dijelaskan dari pengujian yang dilakukan memberikan nilai yang baik, dengan nilai koefisiensi determinasi sebesar 93,7%. Dalam hal ini maka variabel pengelolaan dana desa dapat menjelaskan oleh variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi, kompetensi dan kebijakan sebesar 93,7% sedangkan 6,3% dipengaruhi variabel yang lain.

d) Pembahasan dan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa 5 variabel yang digunakan Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi, kompetensi dan kebijakan dalam pengelolaan dana desa (Studi Kasus Kantor Desa Di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo), variabel dalam penelitian ini meliputi akuntabilitas, transparansi, partisipasi, kompetensi dan kebijakan. Dalam variabel ini terdapat indikator-indikator yang kemudian dibentuk pertanyaan yang sudah disusun dan diisi oleh responden.

Setiap responden memiliki alasan berdeda-beda dalam melakukan jawaban pertanyaan tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi, kompetensi dan kebijakan dalam pengelolaan dana desa (Studi Kasus Kantor Desa Di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo), banyak faktor yang lain terhadap pengelolaan dana desa sehingga faktor dalam penelitian ini yaitu pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi, kompetensi dan kebijakan dalam pengelolaan dana desa (Studi Kasus Kantor Desa Di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo).

Hasil penelitian pada masing-masing variabel yang telah dianalisis sebagai berikut:

1. Pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi, kompetensi dan kebijakan terhadap pengelolaan dana desa.

Pembahasan pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi, kompetensi dan kebijakan terhadap pengelolaan dana desa yang telah diolah menghasilkan nilai signifikasi maka semua variabel dalam penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia R & Maryono (2022), Handayani N (2021), Mildawati T (2019) dan Fadjrih N (2018) menjelaskan bahwa seluruh variabel dalam penelitian berpengaruh signifikan terhadap variabel pengelolaan dana desa, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa seluruh variabel berperan penting dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis mengenai semua variabel sehingga dapat dijelaskan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi, kompetensi dan kebijakan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

2. Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa.

Implikasi dari tanggung jawab pengelolaan sumber daya desa juga dibahas. Variabel tanggung jawab mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan sumber daya desa. Banyak faktor lain yang mempengaruhi pengelolaan sumber daya desa juga diteliti dalam penelitian ini

Menurut Sabeni dan Ghozali dalam Sujarweni (2015), tanggung jawab atau akuntabilitas pemerintah adalah suatu jenis tugas yang ada pada

seseorang (direktur/pimpinan/manajer) untuk memastikan bahwa tugas dan kewajibannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas berarti berfungsinya mekanisme pemerintahan desa, mulai dari perencanaan hingga pengawasan pelaksanaannya. Dengan menggunakan anggaran tersebut, seseorang harus bertanggung jawab dan melaporkan dengan baik kepada masyarakat dan jajaran pemerintah yang mendahuluinya mengenai pelaksanaan setiap operasi. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Aulia A (2022), Handyaani N (2021) dan Emilianus J (2019) yang menjelaskan bahwa variabel tanggung jawab mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel pengelolaan dana desa dan secara bersama-sama dana desa. tindakan. Penelitian ini menjelaskan bahwa akuntabilitas sangat berguna dalam pengelolaan keuangan desa. Yohanes A & Asih W (2018) dan Edi Y & Aqfir (2020) menemukan dalam penelitiannya bahwa variabel tanggung jawab tidak mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan dana desa karena tanggung jawab tersebut tidak cukup untuk meningkatkan pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis mengenai variabel akuntabilitas dapat dijelaskan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

3. Pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa.

Pembahasan pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa yang diolah dengan program SPSS 23 menunjukkan bahwa variabel transparansi mempunyai nilai yang signifikan, sehingga variabel transparansi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

pengelolaan dana desa. . Masih banyak faktor lain yang mempengaruhi pengelolaan dana desa.

Sujarweni (2015) menyatakan bahwa transparansi menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk menerima informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu: H. Informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan implementasinya, serta hasil yang dicapai. Tata kelola yang baik memerlukan transparansi, partisipasi dan kemudahan akses bagi warga negara terhadap proses administrasi. Transparansi dan kemudahan pengelolaan informasi mempengaruhi penerapan.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil Hariono T (2019) dan Yohanes A (2018) yang menjelaskan bahwa variabel transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pengelolaan dana desa dan mempunyai pengaruh yang sama terhadap pengelolaan dana desa. sebuah desa. keuangan , menjelaskan dalam penelitian ini bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Edi Y & Aqfir (2020) dan Ibnu N & Elfan N (2020) menemukan dalam penelitiannya bahwa variabel transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa dan transparansi dapat meningkatkan pengelolaan dana desa.

Hal ini disebabkan kurangnya informasi dalam pengelolaan dan penatausahaan dana desa tentang pentingnya keterbukaan kepada masyarakat umum agar semua orang dapat mengetahui pengelolaan dan tujuan dana desa, baik memenuhi tujuan atau tidak. manajemen berjalan dengan lancar. Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis variabel transparansi dapat dijelaskan bahwa transparansi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan aset desa.

4. Pengaruh partisipasi terhadap pengelolaan dana desa.

Pada penelitian ini pembahasan pengaruh partisipasi terhadap pengelolaan aset desa yang diolah dengan program SPSS 23 menghasilkan fakta bahwa variabel partisipasi mempunyai nilai signifikan, variabel partisipasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengelolaan suatu desa. Aset Masih banyak lagi faktor yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap pengelolaan aset desa.

Menurut Andriani (2018), partisipasi dapat diartikan sebagai partisipasi sadar seseorang dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pemahaman ini, seseorang dapat berpartisipasi ketika berada dalam atau dalam suatu kelompok melalui proses berbagi nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, ketaatan dan tanggung jawab bersama yang berbeda. Kamus Sosiologi menyebutkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan seseorang yang tergabung dalam suatu kelompok sosial dalam kegiatan masyarakat di luar pekerjaan atau profesinya sendiri (Theresia dkk. 2015:196)

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Aulia R & Maryono (2022) dan Emilianus J (2019) bahwa variabel partisipasi berpengaruh positif signifikan terhadap variabel pengelolaan dana desa dan dapat mempengaruhi pengelolaan dana desa secara keseluruhan. Hasil penelitian Edi Y & Aqfir (2020) menjelaskan bahwa variabel partisipasi dalam penelitian ini artinya variabel partisipasi tidak mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis mengenai variabel partisipasi dapat dijelaskan bahwa partisipasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

5. Pengaruh kompetensi terhadap pengelolaan dana desa.

Pembahasan pengaruh kompetensi terhadap pengelolaan sumber daya desa yang diolah dengan program SPSS 23 menunjukkan bahwa variabel kompetensi mendapat nilai signifikan yaitu variabel kompetensi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengelolaan sumber daya desa. Dalam penelitian ini faktor kompetensi tidak dapat mempengaruhi pengelolaan sumber daya desa.

Kualifikasi pada dasarnya berarti profesionalisme, kemampuan, keterampilan. Sumber daya manusia harus berkualitas, artinya sumber daya manusia tersebut berkualitas, mumpuni atau kompeten. Kompetensi mengacu pada kualitas atau karakteristik seseorang yang menjadikannya sukses dalam bekerja (Widyatama, 2017).

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa keahlian tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan barang milik desa. Hal ini bisa terjadi karena tidak semua pengelola dana desa mampu mengelola dana desa, karena mesin atau anggota yang mengelola dana desa tidak mempunyai pengetahuan dan integritas dalam menjalankan tugas pengelolaan dana desa, sehingga mudah saja, mereka menggunakan dana desa untuk keperluan pengelolaan dana desa. tidak diinginkan. kegiatan . Begitu pula dengan ketidaktahuan bendahara desa akan pentingnya keterampilan dalam mengelola dana desa (Mada, 2021).

Keberhasilan program pengelolaan dana desa dicapai apabila keterampilannya “manajemen yang baik”. Keahlian tingkat tinggi ini juga harus selaras dengan pemahaman tentang aturan dan prosedur pelaksanaan dana desa, sehingga seluruh pemangku kepentingan memiliki keahlian

dalam pengelolaan dana desa, sehingga efisiensi pengelolaan dana desa dapat tercapai dengan baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mada (2021) bahwa variabel partisipasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel pengelolaan dana bantuan sekolah, namun secara bersama-sama dapat mempengaruhi pengelolaan dana bantuan sekolah. Pada penelitian Aulia N (2021), Monika A (2022) dan Riski A (2022) ditemukan variabel kompetensi mempunyai pengaruh terhadap variabel pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis mengenai variabel kompetensi, dapat dijelaskan bahwa kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

6. Pengaruh kebijakan terhadap pengelolaan dana desa.

Pembahasan dampak kebijakan terhadap pengelolaan sumber daya desa yang diolah dengan SPSS 23 menghasilkan variabel kebijakan mendapat nilai signifikan, sehingga variabel kebijakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengelolaan sumber daya desa. Kajian ini juga memperhitungkan banyak faktor yang paling mempengaruhi pengelolaan dana desa.

Kebijakan adalah peraturan dan pedoman yang diikuti dan ditetapkan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Pada saat yang sama, politik desa merupakan produk hukum, karena setiap pemerintahan desa mempunyai hak atau kekuasaan yang sah, meskipun kecil dan meluas hingga wilayah

administrasi desa itu sendiri. (Dura, 2016). Peraturan desa tersebut termasuk dalam peraturan desa yang berlaku di wilayah desa. Tujuan dari peraturan desa ini bukan untuk melaksanakan otonomi yang mandiri, melainkan bertanggung jawab atas otonomi dengan tetap berada di bawah kendali pemerintah kabupaten/kota. Namun desa mempunyai kekuatan untuk membantu menentukan arah pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan desa pada khususnya (Novitasari, 2019).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nova E, Amin S & Zulkifli (2020) yang menemukan bahwa variabel politik berpengaruh positif signifikan terhadap variabel pengelolaan dana desa dan secara bersama-sama dapat mempengaruhi pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis mengenai variabel kebijakan dapat dijelaskan bahwa kebijakan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Kompetensi dan Kebijakan Dalam Pengelolaan Dana Desa sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian spss bahwa variabel akuntabilitas transparansi, partisipasi kompetensi dan kebijakan berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel pengelolaan dana desa.
2. Hasil pengujian mengenai variabel akuntabilitas (X_1) menghasilkan nilai signifikan. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan antara variabel akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa.
3. Hasil pengujian mengenai variabel transparansi (X_2) menghasilkan nilai signifikan. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara variabel transparansi terhadap pengelolaan dana desa.
4. Hasil pengujian mengenai variabel partisipasi (X_3) menghasilkan nilai signifikan. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan antara variabel partisipasi terhadap pengelolaan dana desa.
5. Hasil pengujian mengenai variabel kompetensi aparat desa (X_4) menghasilkan nilai signifikan. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa

tidak ada pengaruh signifikan variabel kompetensi terhadap pengelolaan dana desa.

6. Hasil pengujian mengenai variabel kebijakan (X_5) menghasilkan nilai signifikan. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan antara variabel kebijakan terhadap pengelolaan dana desa.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Penelitian Selanjutnya
 - a) Perlu adanya penelitian selanjutnya agar penelitian ini dapat menjadi sempurna, diharapkan penelitian selanjutnya menambah jumlah sampel data responden agar hasil yang didapatkan lebih akurat.
 - b) Peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sama maka diharapkan variabel-variabel yang digunakan lebih baik selain variabel yang sudah diteliti.
2. Bagi Kantor Desa Di Kecamatan Gatak
 - a) Agar dapat meningkatkan partisipasi, transparansi, kompetensi dan kebijakan sehingga pengelolaan dana desa lebih transparan didalam pengelolaannya.
 - b) Dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan pengelolaan dana bantuan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Website <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma> , diakses pada hari Kamis, 13 Oktober 2022 pada jam 20.30 WIB.
<https://gatak.sukoharjo.go.id/profil> , diakses pada hari Selasa, 8 November 2022 pada jam 08.30 WIB.
<https://id.m.wikipedia.org> , diakses pada hari Minggu, 22 Januari 2023 pada jam 19.11 WIB.
- 2) Artikel di Jurnal

A.Rakhma Larasati P, Maryono. (2022). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*. Pengaruh Transparansi Akuntabilitas Partisipasi Masyarakat dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Vol, 4 spesial ISSUE 3 2022.

R.Amrullah (2019). *Penelitian Rifkayanti Amrullah*. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa.

N.Asia Usman B, P.Ika Nugroho (2021). *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humainiora*. Akuntabilitas dan Trasnparansi Pengelolaan Dana Desa. Vol, 5 h. 133-139.

E.Yanto, Aqfir (2020). *Economy Deposit Journal*. Pengaruh Transparansi Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Volume 2 No 2.

A.Avellyni Leda M (2021). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Pengaruh Akuntabilitas Transparansi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. Vol 10 No 10.

I Made Yoga D.P (2019). *E-Jurnal Akuntansi*. Pengaruh Akuntabilitas Transparansi dan Partisipasi Masyarakat pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. Pengaruh Akuntabilitas Transparansi dan Partisipasi Masyarakat pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desaol 28. 132-158.

I.Ngakil, M.Elfan K. (2018). *Journal of Economics, Management, Accounting and Technology (JEMATech)*. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo. Vol 3 No 2. C.Yunnita G.,L.Lomi Ga. (2020). *Jurnal Akuntansi Transparansi dan Akuntabilitas*. Pengaruh akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian GOOD GOVERNANCE Desa Manuela Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka. Vol 8 No 1.

Lintang Sari. (2021) Pengaruh Kompetensi Partisipasi Masyarakat Komitmen, dan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Kantor Desa Wilayah Kecamatan Sawit Kabupaten Sukoharjo).

Ferina, S.I. (2016) Tinjauan Kesipan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengeloaan Keuangan Dana Desa.

Riski A.,Maryono. (2022). Pengaruh kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

W. Ultrafiah. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan good governance pada desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten lahat.

3) Menurut Para Ahli

Pengertian Desa (R. Bintarto, 2011:4), (Paul H. Landis, 2014:15),
(Sutardjo Kartohadikusumo, 2015:9)

Alokasi Dana Desa (Ultrafiah, 2017),

Akuntabilitas Sabeni dan Ghozali dalam Sujarweni (2015), (Mahmudi dan Ultrafiah, 2017), Menurut Sujarweni (2015).

Transparansi (Sujarweni,2015),(Hamid,2016)

Partisipasi Masyarakat (Andriani,2018), (Theresia at all, 2015),
(Purwaningsih, 2020), (Handayani,2017),(Tasya,2019)

Kompetensi Aparat Desa (Widyatama,2017),(Atiningsih,2019),
(Widiawaty,2019),(Indrianasari,2017)

Kebijakan (Chasanah,2017), (Dura,2016), (Novitasari,2019).

4) Menurut Undang-Undang

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN mengatur bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan tentang keuangan negara, antara lain Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi

Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara

PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah

Pasal 96 ayat 1 dan 2 PP 47 tahun 2015 perubahan atas PP 43 tahun 2014tentang alokasi dana desa.

PERPRES No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

PP No. 45 Tahun2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

UU No 1 Tahun 2012 mengatur mengenai lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah negara.

Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.
Dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.

Lampiran 1. Kuisisioner Penelitian

KUISISIONER PENELITIAN

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr/i

Di Tempat

Hal: Permohonan Mengisi Kuisisioner Penelitian

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yulia Dwi Astari

Nim : 19210017

Program Studi : Akuntansi

Perguruan Tinggi : STIE Surakarta

Memohon kesanggupan dari Bapak/Ibu/Sdr/i untuk kiranya dapat berpartisipasi dalam mengisi kuisisioner penelitian ini, berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul “ **Pengaruh Akuntabilitas, Transparasi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparat Desa, dan Kebijakan Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo)**” dalam rangka menyelesaikan program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun Pemerintah Desa. Oleh karena itu mohon kesanggupan dan partisipasi dari Bapak/Ibu/Sdr/i untuk mengisi/menjawab kuisisioner ini dengan sejujur-jurjurnya. Kuisisioner ini hanya untuk kepentingan skripsi tidak untuk dipublikasikan dan kerahasiaan data akan tetap dijaga.

Atas kerjasama yang baik dan kesungguhan Bapak/Ibu/Sdr/i dalam mengisi kuisisioner ini, Saya ucapkan terima kasih.

Sukoharjo, November 2022

Hormat Saya

Yulia Dwi Astari

Lampiran 2. Identitas responden

IDENTIFIKASI RESPONDEN

Nama Responden :(Nama boleh tidak diisi)

Jabatan :

Umur :Tahun

Lama Bekerja :Bln/Thn

(Berikan Tanda Ceklis pada kotak yang tersedia)

Jenis Kelamin : ☐ Laki-Laki ☐ Perempuan

Pendidikan Terakhir : ☐ SMA ☐ D3 ☐ 1 ☐ 2 ☐

Pengalaman Kerja : ☐ > 1 Tahun

☐ 1-3 Tahun

☐ 3 Tahun

☐ 5 Tahun

Cara Pengisian

Di bawah ini adalah pernyataan-pernyataan yang ditujukan untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas, Transparasi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparat Desa, dan Kebijakan Terhadap Pengelolaan Dana Desa dengan Studi Kasus Desa Di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, Bapak/Ibu/Sdr/i dimohon kesediannya memberi tanda ceklis, diantara pilihan jawaban yang ada. Dengan ketentuan sebagai berikut :

Sts : Sangat tidak setuju

Ts : Tidak setuju

RR : Ragu-Ragu

S : Setuju

Ss : Sangat setuju

Lampiran 3. Kuisisioner

1. Akuntabilitas

No	Pertanyaan	STS	TS	RR	S	SS
Perencanaan (Sumber, Lintang Sari, 2021)						
1	Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa					
2	Sekretaris Desa menyampaikan Raperdes APBDes kepada Kepala Desa					
Pelaksanaan (Sumber, Lintang Sari, 2021)						
3	Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa					
4	Bendahara menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa					
Penatausahaan (Sumber, Lintang Sari, 2021)						
5	Bendahara desa membuat buku kas umum					
6	Bendahara desa membuat buku kas pembantu pajak					
Pelaporan Pertanggung jawaban (Sumber, Lintang Sari, 2021)						
7	Kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota					
8	Kepala desa menyampaikan laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes					

2. Transparasi

No	Pertanyaan	STS	TS	RR	S	SS
Keterbukaan Informasi (Sumber, Rifkayanti Amrullah, 2021)						
1	Rencana sumber dan penggunaan dana desa telah di musyawarakan					
2	Pihak desa telah menyediakan akses terhadap informasi mengenai rencana sumber dan penggunaan dana desa					

3. Partisipasi Masyarakat

No	Pertanyaan	STS	TS	RR	S	SS
Pengambilan Keputusan (Sumber, Lintang Sari, 2021)						
1	Masyarakat terlibat secara aktif dalam mengawasi dan melaporkan pelaksanaan anggaran dana desa					
2	Masyarakat mengusulkan rencana alternatif anggaran dana desa terhadap rancangan anggaran dana desa untuk diajukan kepada pemerintah desa					
Penyusunan Anggaran (Sumber, Lintang Sari, 2021)						
3	Masyarakat terlibat aktif dalam mengawasi dan melaporkan pelaksanaan anggaran dana desa					
4	Masyarakat secara aktif memberikan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran dana desa					
Pelaksanaan Anggaran (Sumber, Lintang Sari, 2021)						
5	Masyarakat memberikan penghargaan terhadap keberhasilan pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran dana desa					
6	Masyarakat bersedia menjaga melestarikan dan mengaplikasikan hasil dari program yang dilaksanakan desa					
3	Laporan pertanggung jawaban dana desa telah dipublikasikan kepada masyarakat					
4	Informasi mengenai hasil pelaksanaan pembangunan desa telah dapat diakses masyarakat melalui website atau papan pengumuman					

4. Kompetensi Aparat Desa

No	Pertanyaan	STS	TS	RR	S	SS
Pengetahuan (Sumber, Lintang Sari, 2021)						
1	Saya merasa pengetahuan yang cukup dapat menunjang pengelolaan yang baik					
2	Saya merasa aparat desa dapat meningkatkan pengetahuannya dengan pelatihan teknis terkait pengelolaan dana desa					
Kemampuan (Sumber, Lintang Sari, 2021)						
3	Saya merasa kemampuan dalam mengelola keuangan desa harus dimiliki setiap aparat					
4	Saya merasa aparat desa mampu menemukan solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam bekerja					
Sikap (Sumber, Lintang Sari, 2021)						
5	Saya merasa dalam melakukan pekerjaan aparat desa saling membantu					

5. Kebijakan

No	Pertanyaan	STS	TS	RR	S	SS
Hak (Sumber, Dura, 2016)						
1	Saya merasa pemerintah desa sudah memiliki hak yang sesuai dengan ketentuan hukum untuk diikuti masyarakat seperti wajib pajak bangunan					
2	Saya merasa pemerintah desa sudah membuat aturan/hak sesuai dengan hukum yang berlaku					
Kewajiban (Sumber, Dura, 2016)						
3	Saya merasa pemerintah desa sudah memberikan kewajiban pelayanan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku					

6. Pengelolaan Dana Desa

No	Pertanyaan	STS	TS	RR	S	SS
Keterbukaan Informasi (Sumber, I Made Yudha W, 2021)						
1	Pengelolaan dana desa telah melalui perencanaan sesuai dengan ketentuan					

2	Pelaksanaan pengelolaan dana desa telah ditetapkan sebelum transaksi penerimaan dan pengeluaran desa					
3	Pengelolaan keuangan dana desa selalu disusun secara jujur dan sesuai dengan Permendagri No 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa					
4	Realisasi dana desa selalu diinformasikan melalui baliho/spanduk di depan kantor desa					
5	Dalam penyampaian laporan keuangan dana desa dilakukan secara tepat waktu dan menyeluruh					

Lampiran 4. Hasil Olah Data

Correlations							
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	JML Y
Y1	Pearson Correlation	1	-,099	-,104	-,076	,018	,391**
	Sig. (2-tailed)		,300	,273	,428	,853	,000
	N	112	112	112	112	112	112

Correlations

Y2	Pearson Correlation	-,099	1	.421**	.605**	.394**	.725**
	Sig. (2-tailed)	,300		,000	,000	,000	,000
	N	112	112	112	112	112	112
Y3	Pearson Correlation	-,104	.421**	1	.435**	.389**	.668**
	Sig. (2-tailed)	,273	,000		,000	,000	,000
	N	112	112	112	112	112	112
Y4	Pearson Correlation	-,076	.605**	.435**	1	.667**	.721**
	Sig. (2-tailed)	,428	,000	,000		,000	,000
	N	112	112	112	112	112	112
Y5	Pearson Correlation	,018	.394**	.389**	.667**	1	.551**
	Sig. (2-tailed)	,853	,000	,000	,000		,000
	N	112	112	112	112	112	112
JML_Y	Pearson Correlation	.391**	.725**	.668**	.721**	.551**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	112	112	112	112	112	112

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	JML	X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.667**	-,078	.357**	.486**	-,076	.605**	.421**	.719**
	Sig. (2-tailed)		,000	,411	,000	,000	,428	,000	,000	,000
	N	112	112	112	112	112	112	112	112	112
X1.2	Pearson Correlation	.667**	1	-,149	.219*	.395**	,018	.394**	.386**	.628**
	Sig. (2-tailed)	,000		,118	,020	,000	,853	,000	,000	,000
	N	112	112	112	112	112	112	112	112	112
X1.3	Pearson Correlation	-,078	-,149	1	-,131	-,195*	,145	,095	,109	.313**
	Sig. (2-tailed)	,411	,118		,170	,039	,126	,321	,251	,001
	N	112	112	112	112	112	112	112	112	112
X1.4	Pearson Correlation	.357**	.219*	-,131	1	.410**	-,147	.396**	.223*	.485**
	Sig. (2-tailed)	,000	,020	,170		,000	,123	,000	,018	,000
	N	112	112	112	112	112	112	112	112	112

X1.5	Pearson Correlation Sig. (2- tailed) N	.486** ,000 112	.395** ,000 112	-.195* ,039 112	.410** ,000 112	1 112	-,151 ,113 112	.486** ,000 112	.325** ,000 112	.569** ,000 112
X1.6	Pearson Correlation Sig. (2- tailed) N	-,076 ,428 112	,018 ,853 112	,145 ,126 112	-,147 ,123 112	-,151 ,113 112	1 ,300 112	-,099 ,378 112	-,084 ,378 112	.216* ,022 112
X1.7	Pearson Correlation Sig. (2- tailed) N	.605** ,000 112	.394** ,000 112	,095 ,321 112	.396** ,000 112	.486** ,000 112	-,099 ,300 112	1 ,000 112	.461** ,000 112	.739** ,000 112
X1.8	Pearson Correlation Sig. (2- tailed) N	.421** ,000 112	.386** ,000 112	,109 ,251 112	.223* ,018 112	.325** ,000 112	-,084 ,378 112	.461** ,000 112	1 112	.638** ,000 112
JML_X1	Pearson Correlation Sig. (2- tailed) N	.719** ,000 112	.628** ,000 112	.313** ,001 112	.485** ,000 112	.569** ,000 112	.216* ,022 112	.739** ,000 112	.638** ,000 112	1 112

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	JML_X2
X2.1	Pearson Correlati on Sig. (2- tailed) N	1 112	,020 ,834 112	,036 ,709 112	,059 ,537 112	.521** ,000 112
X2.2	Pearson Correlati on Sig. (2- tailed) N	,020 ,834 112	1 112	-,026 ,786 112	.337** ,000 112	.494** ,000 112
X2.3	Pearson Correlati on Sig. (2- tailed) N	,036 ,709 112	-,026 ,786 112	1 112	,016 ,871 112	.594** ,000 112
X2.4	Pearson Correlati on Sig. (2- tailed) N	,059 ,537 112	.337** ,000 112	,016 ,871 112	1 112	.568** ,000 112
JML_X2	Pearson Correlati on Sig. (2- tailed) N	.521** ,000 112	.494** ,000 112	.594** ,000 112	.568** ,000 112	1 112

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations								
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	JML X3
X3.1	Pearson Correlation	1	.623**	.581**	.612**	.521**	.521**	.793**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	112	112	112	112	112	112	112
X3.2	Pearson Correlation	.623**	1	.768**	.517**	.637**	.637**	.841**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	112	112	112	112	112	112	112
X3.3	Pearson Correlation	.581**	.768**	1	.640**	.566**	.566**	.829**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	112	112	112	112	112	112	112
X3.4	Pearson Correlation	.612**	.517**	.640**	1	.434**	.434**	.740**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	112	112	112	112	112	112	112
X3.5	Pearson Correlation	.521**	.637**	.566**	.434**	1	1.000**	.853**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		0,000	,000
	N	112	112	112	112	112	112	112
X3.6	Pearson Correlation	.521**	.637**	.566**	.434**	1.000**	1	.853**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	0,000		,000
	N	112	112	112	112	112	112	112

JML_X3	Pearson Correlation	.793**	.841**	.829**	.740**	.853**	.853**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	112	112	112	112	112	112	112

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	JML_X4
X4.1	Pearson Correlation	1	-,026	-,019	-,026	-,114	.331**
	Sig. (2-tailed)		,783	,841	,786	,233	,000
	N	112	112	112	112	112	112
X4.2	Pearson Correlation	-,026	1	.303**	-,018	-,043	.500**
	Sig. (2-tailed)	,783		,001	,852	,650	,000
	N	112	112	112	112	112	112
X4.3	Pearson Correlation	-,019	.303**	1	,005	.381**	.604**
	Sig. (2-tailed)	,841	,001		,961	,000	,000
	N	112	112	112	112	112	112
X4.4	Pearson Correlation	-,026	-,018	,005	1	,003	.533**
	Sig. (2-tailed)	,786	,852	,961		,977	,000
	N	112	112	112	112	112	112
X4.5	Pearson Correlation	-,114	-,043	.381**	,003	1	.424**
	Sig. (2-tailed)	,233	,650	,000	,977		,000
	N	112	112	112	112	112	112
JML_X4	Pearson Correlation	.331**	.500**	.604**	.533**	.424**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	112	112	112	112	112	112

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		X5.1	X5.2	X5.3	JML X5
X5.1	Pearson Correlation	1	-,099	-,084	.531**
	Sig. (2-tailed)		,300	,378	,000
	N	112	112	112	112
X5.2	Pearson Correlation	-,099	1	.461**	.665**
	Sig. (2-tailed)	,300		,000	,000
	N	112	112	112	112
X5.3	Pearson Correlation	-,084	.461**	1	.678**
	Sig. (2-tailed)	,378	,000		,000
	N	112	112	112	112
JML_X5	Pearson Correlation	.531**	.665**	.678**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	112	112	112	112

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	112	100,0
	Excluded ^a	0	0,0
	Total	112	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,761	6

Case Processing Summary

	N	%
Cases Valid	112	100,0
Excluded ^a	0	0,0
Total	112	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,705	9

Case Processing Summary

	N	%
Cases Valid	112	100,0
Excluded ^a	0	0,0
Total	112	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,670	5

Case Processing Summary

	N	%
Cases Valid	112	100,0
Excluded ^a	0	0,0
Total	112	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Case Processing Summary

	N	%
Cases Valid	112	100,0
Excluded ^a	0	0,0
Total	112	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Case Processing Summary

	N	%
Cases Valid	112	100,0
Excluded ^a	0	0,0
Total	112	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,705	4

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.968 ^a	,937	,934	,439	,937	314,749	5	106	,000	1,583

a. Predictors: (Constant), JML_X5, JML_X2, JML_X4, JML_X3, JML_X1

b. Dependent Variable: JML_Y

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	303,345	5	60,669	314,749	.000 ^b
Residual	20,432	106	,193		
Total	323,777	111			

a. Dependent Variable: JML_Y

b. Predictors: (Constant), JML_X5, JML_X2, JML_X4, JML_X3, JML_X1

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	,029	,524		,055	,956		
JML_X1	,160	,028	,282	5,673	,000	,240	4,165
JML_X2	,288	,025	,307	,113	,910	,810	1,235
JML_X3	,067	,019	,123	3,474	,001	,474	2,110
JML_X4	,427	,026	,048	,167	,867	,730	1,369
JML_X5	,802	,053	,643	15,052	,000	,326	3,065

a. Dependent Variable: JML_Y

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	12,02	19,20	15,83	1,653	112
Residual	-2,727	,896	,000	,429	112
Std. Predicted Value	-2,306	2,040	,000	1,000	112
Std. Residual	-6,211	2,040	,000	,977	112

a. Dependent Variable: JML_Y

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		112
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,42903518
Most Extreme Differences	Absolute	,124
	Positive	,082
	Negative	-,124
Test Statistic		,124
Asymp. Sig. (2-tailed)		,120 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

